

# SKRIPSI

**Analisis Kinerja Keuangan Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Masa  
Pandemi COVID-19**

**Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam Riau Pekanbaru**



**OLEH :**

**MARDANI KUMBARA**

**NPM : 175210321**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

## ABSTRAK

### **Analisis Kinerja Keuangan Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.**

OLEH :

**MARDANI KUMBARA**

**175210321**

Tujuan penelitian untuk menganalisis kinerja keuangan dan menganalisis perbandingan pada kinerja keuangan Unit Usaha Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara data laporan 2017-2018 sebelum pandemi covid-19 dan masa pandemi covid-19 tahun 2019-2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dan menggunakan alat statistik uji beda Independent Sample T-test. Berdasarkan analisis Uji Beda Independent Sample T-test menggunakan Variabel yang memiliki perbedaan yang signifikan ada 4 yaitu Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), dapat ditarik sebuah kesimpulan diduga kinerja keuangan unit usaha syariah menunjukkan baik 2017-2018 sedangkan pada tahun 2019-2020 kondisi kurang baik.

**Kata Kunci :** *Unit Usaha Syariah, Rasio Keuangan, dan Uji Independent Sample T-test*

## ABSTRACT

### **Analysis of Financial Performance in Sharia Business Units in Indonesia During the Covid-19 Pandemic.**

BY

**MARDANI KUMBARA**

**175210321**

The purpose of this study was to analyze financial performance and analyze the comparison of the financial performance of Sharia Business Units in Indonesia during the Covid-19 Pandemic. This research was carried out using secondary research data obtained by researchers indirectly through media intermediaries for 2017-2018 report data before the covid pandemic. -19 and the 2019-2020 covid-19 pandemic. The data analysis technique used is descriptive analysis, and uses the Independent Sample T-test statistical tool. There are 4, namely Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Operating Expenses and Operating Income (BOPO). 2017-2018 before the pandemic experienced an increase while in tofu n 2019-2020 the pandemic period fluctuated and decreased.

**Keywords :** *Sharia Business Unit, Financial Ratios, and Independent Sample T-test*

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah,allah swt,senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,kepada penulis.sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia masa pandemi covid-19”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini,penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,masih banyak kekurangan baik itu dari segi pembahasan maupun penulisan materi.Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis,dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan peneliti selanjutnya`

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak.untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- 1.Dr. Eva Sundari,SE.,MM.,CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIR`
- 2.Abd. Razak Jer,SE,MM,selaku ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- 3.Dr. Hamdi Agustin,SE,MM, Selaku Dosen Pembimbing yang tak pernah lelah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini

4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama dibangku perkuliahan, serta para pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah ikut membantu kelancaran dalam proses kegiatan belajar mengajar dikampus.
5. Kedua orang tua yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan selama ini untuk penulis bisa sampai pada titik ini.
6. Keluarga besar yang telah mendukung dan mendorong untuk terus bangkit dan semangat dalam menjalani rintangan yang dihadapi.
7. Para sahabat kos yang telah mensupport, mendukung dan saling menguatkan memberikan motivasi untuk tidak menyerah ditengah jalan dari awal kuliah sampai sekarang.
8. Teman-teman angkatan 17 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Penulis telah berusaha dengan maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun apabila masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penyusunan maupun dari segi isi, penulis mohon maaf.

Pekanbaru, 29 Januari 2022

Penulis

**Mardani Kumbara**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8

BAB II TELAAH PUSTAKA .....

2.1 Pengertian Unit Usaha Syariah .....	10
2.2 Dasar hukum perkembangan Unit Usaha Syariah .....	13
2.3 Prinsip Unit Usaha Syariah .....	14
2.4 Jenis Bank Unit Usaha Syariah .....	15
2.5 Struktur Unit Usaha Syariah .....	17

2.6 Pengertian Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah .....	19
2.7 Rasio keuangan Unit Usaha Syariah .....	20
2.8 Manajemen Pembiayaan Unit Usaha Syariah .....	21
2.9 Jenis-jenis Rasio Unit Usaha Syariah .....	27
2.10 Penelitian Terdahulu .....	29
2.11 Hipotesis dan Kerangka Pemikiran .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian .....	34
3.2 Defenisi Operasional Variabel Unit Usaha Syariah .....	34
3.3 Operasional Variabel .....	35
3.4 Populasi dan Sampel .....	36
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.7 Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>43</b>
4.1.1 Sejarah Unit Usaha Syariah .....	45

4.1.2 Struktur Organisasai Unit Usaha Syariah .....	45
4.1.3 Sejarh Bank Permata,Tbk .....	46
4.1.4 Sejarah Bank Maybank,Tbk .....	47
4.1.5 Sejarah Bank Cimb Niaga,Tbk .....	49
4.1.6 Sejarah Bank OCBC Nisp,Tbk .....	52
4.1.7 Sejarah Bank Sinarmas,Tbk .....	53
4.1.8 Sejarah Bank BTN .....	55
4.1.9 Sejarah Bank Danamon,Tbk .....	58
4.2.1 Sejarah BPD DKI .....	59
4.2.2 Sejarah BPD DIY .....	60
4.2.3 Sejarah BPD Jawa Tengah .....	62
4.2.4 Sejarah BPD Jawa Timur .....	63
4.2.5 Sejarah BPD Sumatera Utara .....	65
4.2.6 Sejarah BPD Sumatera Barat .....	66
4.2.7 Sejarah BPD Jambi .....	67
4.2.8 Sejarah BPD RiauKepri .....	69



4.2.9 Sejarah BPD Kalimantan Selatan .....	70
4.3.1 Sejarah BPD Kalimantan Barat .....	72
4.3.2 Sejarah BPD Kalimantan Timur .....	73
4.3.3 Sejarah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat .....	75
4.3.4 Sejarah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung .....	76
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
5.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .....	78
5.2 Analisis Kinerja Perbandingan Keuangan .....	94
5.3 Pembahasan .....	102
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>106</b>
6.1 Kesimpulan .....	106
6.2 Saran .....	107
Daftar Pustaka .....	

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Rasio Keuangan Unit Usaha Syariah .....	3
TABEL 1.2 Total Aset Perbankan Unit Usaha Syariah Maret 2019-Juni2021 .....	5
TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
TABEL 3.1 Operasional Variabel .....	35
TABEL 3.2 Sampel Unit Usaha Syariah .....	37
TABEL 5.1 Perhitungan Return on Assets (ROA) 2017-2020 .....	79
TABEL 5.3 Perhitungan Financing to Deposit Ratio (FDR) 2017-2020 .....	82
TABEL 5.5 Perhitungan Non Performing Financing (NPF) 2017-2020 .....	85
TABEL 5.7 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 2017-2020 ..	88
TABEL 5.9 Hasil Perhitungan Analisis Kinerja Unit Usaha Syariah Sebelum Covid-19 2017-2018 .....	90
TABEL 5.10 Hasil Perhitungan Analisis Kinerja Unit Usaha Syariah Sebelum Covid-19 2019-2020 .....	92

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Teori Bank Syariah .....	12
GAMBAR 2.2 Kerangka Pemikiran .....	32
GAMBAR 4.1 Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah .....	45



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Unit usaha syariah merupakan sektor keuangan yang terdampak pandemi yang berkepanjangan. Momen ini jadi peluang perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk berkontribusi dalam membantu ekonomi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang relaksasi pembiayaan bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan, karena kebijakan tersebut mempunyai dampak kinerja perbankan.

Unit usaha syariah akan menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah covid 19. Menurut pengamat ekonomi syariah yang juga pendiri Karim Consulting, Adiwirman Karim menyampaikan kondisi industri perbankan syariah bisa lebih dulu memburuk daripada industri bank konvensional.

Di masa pandemi covid-19, saat ini perbankan syariah akan menghadapi beberapa kemungkinan risiko, seperti risiko pembiayaan macet (NPF), risiko pasar dan risiko likuiditas. Oleh karenanya, risiko tersebut pada akhirnya akan memiliki dampak terhadap kinerja dan profitabilitas perbankan syariah. (Wahyu, 2020)

Temuan, Burhany dan Suhartanto (2019) menyimpulkan bahwa usia bank tidak terdampak signifikan terhadap kemampuan laba, tetapi NPF berpengaruh signifikan

terhadap bagi hasil. selanjutnya FDR, dan BOPO tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap bagi hasil. temuan Ardana (2018) CAR, NPF, BI rate dan Inflasi tidak memiliki dampak terhadap ROA. namun FDR dan ROE memiliki dampak terhadap ROA.

Rasio-rasio keuangan berfungsi menunjukkan kinerja perbankan syariah yang sesungguhnya, diantaranya kinerja intermediasi berupa dana himpunan tabungan, giro, deposito, dan penyaluran dana pada pembiayaan. beberapa penelitian telah dilakukan untuk menjelaskan fenomena kinerja perbankan syariah dimasa pandemi covid-19 dengan melakukan analisa laporan keuangan menggunakan rasio keuangan yaitu ROA, NPF, FDR, BOPO dan lainnya. dampak pandemi covid-19 pada industri perbankan dari sisi manajemen strategi operasional bank dan kegiatan intermediasi bank. penelitian ini menggunakan 1 sampel unit usaha syariah (UUS) dengan pendekatan teknik purposive sampling. temuannya menunjukkan bahwa pada maret 2019 semua bank mengalami gejolak pada fungsi intermediasinya yang cenderung menurun baik dari pembiayaan maupun himpunan dana. sementara itu, dalam hal manajemen strategi bank syariah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya pembatasan layanan tatap muka langsung, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dan pemanfaatan aplikasi digital.

**Tabel 1.1**  
**Rasio keuangan Unit Usaha Syariah 2020**

UUS 2020	Bulan								
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
ROA	2,15	2,00	1,95	2,01	2,03	2,02	1,97	1,86	1,81
NPF	3,08	3,24	3,42	3,38	3,33	3,17	3,10	3,10	3,01
FDR	78,06	85,20	91,86	83,41	80,89	95,87	93,67	91,95	96,01
BOPO	76,10	77,41	77,37	76,34	75,82	76,22	76,94	78,16	78,96
NOM	2,08	1,92	1,91	1,98	2,02	1,96	1,89	1,78	1,73
KAP	3,27	3,31	3,28	3,05	2,99	2,74	2,77	2,77	2,74
Likuiditas	23,12	23,82	24,11	24,77	25,05	25,61	27,06	27,33	27,94
DPK	63,34	62,31	62,94	62,77	63,25	64,39	65,31	65,75	63,44
Portofolio	23,71	23,38	22,02	23,17	23,68	2,93	238,40	23,51	23,80
Investasi	63,62	64,15	64,63	64,69	64,48	64,64	64,91	65,12	65,48

Sumber data : Otoritas jasa keuangan (OJK)

Beberapa penelitian yang telah dilakukan kinerja perbankan syariah di masa pandemi menguji 24 sampel unit usaha syariah dengan metode purposive sampling menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan triwulan I. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja bank syariah tetap menunjukkan pertumbuhan kinerja yang berkualitas dan agresif.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja perbankan syariah di Indonesia selama masa pandemi covid-19 tinjauan operasional meliputi pembiayaan berbasis debt and equity financing and third party funds. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena perbankan syariah di Indonesia menganut sistem

dual banking dan memiliki karakteristik yang unik dimana bank syariah dianggap mampu bertahan dalam menghadapi berbagai macam krisis ekonomi.

Namun demikian, pembatasan mobilitas pada masyarakat menjadi dilematis mengingat tidak sesuai kegiatan dalam dimensi kehidupan manusia dapat dilakukan dalam jarak jauh. Hal ini yang mendorong terhentinya operasi usaha terutama pada sektor organisasi profit. Dampak luasnya menyebabkan lesunya kegiatan perekonomian akibat banyak tenaga kerja dirumahkan baik dalam waktu sementara maupun selamanya. Peningkatan angka pengangguran tersebut sama halnya dengan penurunan tingkat pendapatan masyarakat. Adapun penurunan tingkat pendapatan masyarakat dapat berdampak pada tingkat konsumsi yang juga berpengaruh pada tingkat kontraksi pertumbuhan ekonomi (Ubaidillah dan Aji, 2020). Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang resmi minus berturut-turut selama dua kuartal atau resmi mengalami resesi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dengan pertumbuhan ekonomi -3,49 persen.

Pertumbuhan yang mulai kembali negatif pada kuartal ketiga mengindikasikan gangguan kestabilan usaha pada sektor perbankan syariah. Namun demikian, sektor keuangan syariah lebih bertahan dibanding sektor keuangan lainnya. Berikut disajikan data keuangan perbankan syariah jika dibandingkan seluruh aset perbankan secara nasional.

**Tabel 1.2**

**Total Aset Perbankan unit usaha syariah maret 2019-Juni 2021**

No	Triwulan	Total asset
1	Maret 2019	38.560.841
2	Juni 2019	36.792.828
3	September 2019	37.052.848
4	Desember 2019	43.123.488
5	Maret 2020	42.229.396
6	Juni 2020	49.580.078
7	September 2020	56.096.769
8	Desember 2020	57.715.586
9	Maret 2021	234.427.001
10	Juni 2021	247.299.611

**Sumber data :PT BANK BRI SYARIAH**

Data aset perbankan syariah tersebut mengalami penurunan yang sangat buruk berdasarkan laporan keuangan perbankan triwulan II adapun data yang ditampilkan pada tabel menunjukkan bahwa menunjukkan Bahwa aset bank syariah permaret 2019 tercatat sebesar Rp 38.560.841 Triliun pada juni 2019 mengalami penurunan sebesar 36.792.828 Triliun.perbankan syariah juga memfokuskan pada pengembangan sektor rill,adapun perbankan syariah lebih fokus pada tranksaksi spekulatif berdasarkan bunga.bank syariah cenderung lebih bertahan dalam krisis karena menggunakan prinsip syariah sebagai model pengembangan perekonomian berdasarkan sistem ekonomi islam.



Industri perbankan syariah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi rakyat, berkontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktifitas ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif tetapi dimasa pandemi covid-19 ini industri perbankan syariah harus bergerak cepat dalam beradaptasi dengan membuat strategi inovasi baru serta mengurangi risiko yang tepat dan cermat serta menggunakan strategi kreatif untuk bertahan dalam menghadapi pandemi covid-19 yang membuat kondisi ekonomi tidak menentu. dalam arti an industri perbankan syariah mempunyai tantangan yang cukup signifikan, namun industri perbankan syariah harus melihat permasalahan penyebaran virus ini sebagai tantangan yang harus dirubah menjadi sebuah kesempatan untuk bias lebih baik. untuk itu, sudah saatnya perbankan syariah mulai memperbaiki strategi, mengingat tidak ada yang mengetahui kapan covid-19 ini berakhir.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul “ANALISIS KEUANGAN PADA UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah ialah sebagai berikut : diduga kinerja keuangan unit usaha syariah menunjukan baik 2017-2018 sedangkan pada tahun 2019-2020 kondisi kurang baik.

### 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah diatas,tujuannya yaitu :

- 1.tujuan mengetahui kinerja keuangan pada unit usaha syariah pada masa pandemi covid-19 dalam kondisi sehat.
- 2.tujuan melihat kinerja keuangan dalam mengatur strategi unit usaha syariah pada masa pandemi covid-19 dalam kondisi sehat.

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

- 1.Bagi peneliti bermanfaat sebagai berikut :
  - A.dengan penelitian ini peneliti bisa mendapatkan ilmu baru yang berasal dari kinerja perbankan syariah di Indonesia
  - B.peneliti ini juga bisa menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama dibangku perkuliahan ini dan bisa digunakan langsung jika sudah bekerja
- 2.Bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut :
  - A.dapat digunakan sebagai karya ilmiah dan menambah wawasan peneliti selanjutnya.

B. Dapat menambah ingin rasa tahu peneliti selanjutnya tentang analisis perbandingan kinerja keuangan sehingga bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Daftar isi yang direncanakan akan terbagi menjadi enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab dan bagian-bagian bab. adapun garis besar sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

##### **BAB I :PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian dan yang terakhir adalah sistematika peneliti.

##### **BAB II :TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan teori teori yang berkaitan dengan Unit Usaha Syariah, laporan keuangan, analisis rasio, serta kinerja keuangan, dilengkapi dengan penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran yang dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

##### **BAB III :METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan objek penelitian, definisi operasional variabel, operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan yang terakhir teknik analisis data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah dan gambaran umum Unit Usaha Syariah dan 20 bank yang ada di Unit Usaha Syariah.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan serta saran berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Unit Usaha Syariah

Perbankan syariah adalah entitas yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dalam peraturan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah serta semua transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku pada akad.

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, sistem perbankan telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, di mana dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana sudah ada dalam kegiatan perekonomian di zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam. Masyarakat Makkah selalu menyimpan harta kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam karena beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali R.A. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut (Kusnan and Hakim 2018).

Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam, Zubair bin Awwam R.A. memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair menimbulkan implikasi yang berbeda, yaitu pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkan; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Makkah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Mus'ab bin Zubair yang tinggal di Irak (Muhith 2102; Kusnan and Hakim 2018).

Di zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam, juga terdapat lembaga keuangan dan juga lembaga yang mengurus kepentingan masyarakat, yaitu Baitul Maal. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi

untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Baitul mal merupakan acuan dari perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat simpanan harta dan penyaluran harta.

Pengertian perbankan syariah menurut para ahli :

1. Menurut Sudarsono lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam
2. Menurut Adam Smith dimana perbankan hanya dapat memberikan pinjaman dalam bentuk surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya dimana akan menjadi sumber likuiditas perbankan dan dicairkan dalam keadaan bisnis yang normal.
3. Menurut Siahaan dan Asandimitra menjelaskan bahwa setiap bank seharusnya dapat memberikan kredit jangka panjang dimana pelunasannya dapat berupa cicilan pokok pinjaman ditambah dengan bunga, yang diharapkan pembayarannya kelak akan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan

## Gambar 2.1.

### teori bank syariah



Sumber : Hamdi agustin

### 2.2 Dasar hukum perkembangan Unit Usaha Syariah

Bank syariah pertama kali muncul di Indonesia pada awal 1990 an tepatnya setelah berdirinya bank muamalat Indonesia.adapun seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat islam akan layanan jasa keuangan dengan prinsip syariah maka meningkat juga perkembangan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.komitmen besar pemerintah dan bank Indonesia sebagai pelaksana kebijakan moneter terlihat melalui berbagai kebijakan.UU no 7 tahun 1992 mulai



memperkenalkan sistem perbankan ganda, sekaligus mengawali kesempatan pendirian bank dengan konsep sistem bagi hasil, yaitu BMI, komitmen pemerintah semakin terlihat dengan penerapan dasar hukum perbankan syariah yang digunakan hingga saat ini, yaitu UU no 10 tahun 1998.

UU No 10 tahun 1998 memberikan landasan hukum bagi penerapan sistem perbankan ganda, sekaligus memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk berkembang bahkan bank konvensional turut dapat membuka unit usaha syariah (UUS). dukungan pemerintah lewat regulasi tersebut tidak menjamin sekedar perluasan usaha dan mendorong sisi penawaran, namun juga meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan permintaan. undang-undang no 10 tahun 1998 menjamin dengan tegas keberadaan bank syariah serta bank konvensional dalam sistem perbankan ganda yang diatur dan diawasi oleh bank Indonesia serta otoritas jasa keuangan.

### **2.3 Prinsip dan unit usaha syariah**

#### **1. Prinsip unit usaha syariah**

- a. pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana
- b. islam melarang konsep “uang menghasilkan uang” uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsic

c.unsur gharar(ketidakpastian) tidak diperbolehkan.kedua belah harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi

d.investasi hanya boleh diberikan kepada usaha usaha yang tidak diharamkan oleh islam.contohnya usaha minuman keras,tidak boleh didanai perbankan syariah.

e.pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan

## 2.fungsi unit usaha syariah

a.Bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

b.Bank syariah menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mal,yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,infak,sedekah,hibah atau dana social lainnyadan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

c.bank syariah bisa menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf,sesuai dengan kehendak pemberi wakaf

## 2.4 Jenis Bank Unit usaha syariah.

Unit usaha syariah (UUS) unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Bank unit usaha syariah diantaranya yaitu :

- a. Bank Danamon Indonesia, Tbk
- b. Bank Permata, Tbk
- c. Bank Maybank Indonesia, Tbk
- d. Bank CIMB Niaga, Tbk
- e. Bank OCBC NISP, Tbk
- f. Bank Sinarmas
- g. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
- h. BPD DKI
- i. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
- j. BPD Jawa Tengah
- k. BPD Jawa Timur, Tbk
- l. BPD Sumatera Utara
- m. BPD Jambi



n.BPD Sumatera barat

o.BPD Riau dan Kepulauan Riau

p.BPD sumatera selatan dan Bangka Belitung

q.BPD Kalimantan Selatan

r.BPD Kalimantan barat

s.BPD Kalimantan timur

t.BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

## 2.5 Struktur unit usaha syariah

Unit usaha syariah yang selanjutnya yang disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

Kegiatan usaha unit usaha syariah (UUS) meliputi :

A.Menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- B.menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito,tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- C.menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah,akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- D.meyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah,akad istishna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- E.menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- F.menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan sewa beli dalam bentuk ijarah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- G.melakukan usaha kartu debit dan kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- H.membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain seperti akad musyarakah,ijarah mudharabah,atau akad lainnya.
- I.membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank Indonesia.

J.menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.

K.menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah

L.memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah

M.memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

N.melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan prinsip peraturan perundang-undang.

## 2.6 Pengertian kinerja Unit Usaha Syariah

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang mencakup tindakan menyiratkan keputusan perencanaan, penilaian kinerja dan operasi karyawan. penilaian kinerja adalah alat manajemen untuk menentukan seberapa jauh adalah tujuan perusahaan yang telah dipakai, mengevaluasi kinerja bisnis, manager, divisi dan individu dalam perusahaan, juga untuk memprediksi harappn perusahaan dimasa depan. kinerja yang unggul ditandai dengan efektif

dan efisien pekerjaan dengan baik. sistem pengukuran kinerja yang handal merupakan salah factor kunci keberhasilan organisasi. informasi yang digunakan untuk mengambil atau menilai kinerja di kelompokan menjadi dua, salah satunya kinerja keuangan. kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Pengertian kinerja keuangan menurut para ahli sebagai berikut :

- a. menurut zarkasyi kinerja keuangan adalah merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu perusahaan.
- b. menurut fahmi kinerja keuangan dilakukan untuk menganalisis sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

### **2.7 Rasio keuangan Unit Usaha Syariah**

1. Menurut kasmir rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.
2. menurut riyanto dalam mengadakan analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam cara perbandingannya yaitu :

- a. membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu (ratio history) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. dengan cara perbandingan ini akan dapat diketahui perubahan dari rasio-rasio tersebut dari tahun ketahun. kalo diketahui perubahan dari angka rasio tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan mengenai kecenderungan keadaan keuangan serta hasil operasi perusahaan yang bersangkutan.
- b. membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. dengan cara ini akan dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan dalam aspek keuangan tertentu berada diatas rata-rata industri, berada pada rata-rata atau terletak dibawah rata-rata industri. secara sederhana rasio disebut perbandingan angka, dari satu jumlah angka lainnya dalam suatu perusahaan sejenis dengan menggunakan rasio-rasio yang sama untuk mengetahui keadaan keuangan serta hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. dalam surat edaran bank Indonesia (SEBI) no.9 tahun 2007 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, diatur lebih lanjut tentang rasio-rasio yang digunakan. rasio-rasio keuangan tersebut dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan. rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat



kesehatan bank. sedangkan rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara langsung terhadap ratio utama dan ratio penunjang.

## 2.8 Manajemen pembiayaan Unit Usaha Syariah

Menurut UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, didalam buku pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau kewajiban yang disamakan, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain serta mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan margin atau bagi hasil.

### A. Pembiayaan Debt Financing

pembiayaan debt financing menurut Antonio(2001) merupakan jenis pembiayaan dimana pihak bank sebagai pemberi dana akan membelikan terlebih dahulu barang yang akan ditawarkan kepada nasabah, dan nasabah sebelumnya telah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan menyebutkan spesifikasi dari barang yang diinginkan. keuntungan yang didapatkan bank ditentukan diawal kontrak dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. rumus yang digunakan untuk mengukur debt financing yaitu

$$\text{DEBT FINANCING} = \frac{\text{JUMLAH DEBT FINANCING}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}}$$

Adapun akad-akad yang termasuk dalam debt financing yaitu :

#### 1. Akad Murabahah

Menurut arifin (2009) akad murabahah adalah akad yang digunakan antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah selaku pemesan barang yang akan dibeli. bank juga akan mendapatkan keuntungan dari margin yang sebelumnya disepakati bersama pada awal kontrak.

#### 2. Akad Istishna

Akad istishna adalah akad pembiayaan yang terjadi antara pembeli dengan produsen dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat terlebih dahulu dengan spesifikasi yang telah disebutkan dengan jelas sebelumnya (arifin, 2009).

#### 3. Akad Qardh

Menurut ascarya (2006), akad qardh adalah pinjaman dalam hal kebajikan tanpa imbalan, dan tidak bersifat komersil tetapi bersifat sosial. namun, beberapa ulama tertentu Al-Omar dan Abdel-Haq (1996) di dalam buku ascarya (2006) memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman, dan biaya jasa ini tidak termasuk dalam keuntungan dari pembiayaan yang diberikan tetapi merupakan biaya actual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman

## B. Pembiayaan Sistem Equity Financing

menurut Antonio (2001), pembiayaan equity financing adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha, dimana bank syariah selaku penyedia dana dan nasabah selaku pengelola usaha membuat kesepakatan pada awal kontrak bahwa keuntungan serta resiko usaha tersebut akan ditanggung bersama. rumus yang digunakan untuk mengukur pembiayaan sistem equity financing, yaitu :

$$\text{EQUITY FINANCING} = \frac{\text{JUMLAH EQUITY FINANCING}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}}$$

Adapun akad-akad yang termasuk didalam equity financing, yaitu :

### 1. Akad Mudharabah

Menurut andrianto dan firmansyah (2019), akad mudharabah merupakan pembiayaan yang berupa transaksi penanaman modal dari bank selaku pemilik dana kepada nasabah selaku pengelolaan dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang berbasis syariah dengan pembagian hasil usahanya ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal kontraknya.

### 2. Akad Musyarakah

Menurut ascarya (2006), akad musyarakah digunakan dengan keadaan dimana bank memberikan modal kepada nasabah, untuk melaksanakan suatu usaha atau proyek yang akan atau sedang berjalan, dengan kesepakatan pembagian hasil usahanya ditentukan berdasarkan nisbah dan kerugian juga akan ditanggung bersama seperti yang ditentukan di awal kontrak.

### C. Pembiayaan sistem lease financing

menurut andrianto dan firmansyah (2019), pembiayaan lease financing merupakan fasilitas pembiayaan yang didasarkan oleh perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. rumus yang digunakan untuk mengukur pembiayaan lease financing, yaitu :

$$\text{LEASE FINANCING} = \frac{\text{JUMLAH LEASE FINANCING}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}}$$

Adapun akad yang termasuk didalam lease financing, yaitu :

#### 1. Akad Ijarah

Andrianto dan firmansyah (2019) menjelaskan bahwa akad ijarah adalah akad yang terjadi pada bank dengan nasabah yang memerlukan dana, lalu keduanya menjalankan transaksi sewa menyewa pada suatu barang atau jasa, dan kemudian

bank mendapatkan imbalan atas objek yang disewa atau jasa yang diterima oleh nasabah tersebut.

#### D.Rasio profitabilitas bank

Menurut andrianto et al.(2019) rasio profitabilitas atau rentabilitas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan laba yang telah dicapai oleh bank dalam satu periode tertentu.salah satu indikator yang mempengaruhi penilaian rasio profitabilitas adalah Net Profit Margin (NPM),dimana rasio ini menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.persamaan rumus NPM dapat digambarkan sebagai berikut :

$$NPM = \frac{LABA\ BERSIH}{PENDAPATAN\ OPERASIONAL}$$

#### E.Non performing financing (NPF)

NPF atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dari pembiayaan pada perbankan syariah.resiko ini dap terjadi apabila nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai kesepakatan yang dilakukan diawal kontrak ( andrianto dan firmansyah,2019).hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pencapaian profitabilitas serta tingkat kesehatan dari bank syariah tersebut (Rianti dan elmanizar,2019)

Menurut surat edaran dari BI no.32/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011 menyatakan bahwa, suatu bank syariah dikatakan memiliki tingkat kesehatan yang baik, apabila tidak memiliki NPF di atas 5% adapun cara menghitung nilai dari NPF, yaitu :

$$NPF = \frac{PEMBIAYAAN\ BERMASALAH}{TOTAL\ PEMBIAYAAN}$$

## 2.9 Jenis-jenis rasio keuangan Unit Usaha Syariah

### 1. ROA ( Return On Assets)

ROA dapat digunakan mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. rumus menghitung ROA yaitu :

$$ROA = \frac{LABA\ BERSIH\ SEBELUM\ PAJAK}{TOTAL\ ASET} \times 100$$

## 2.NPF (Non Performing Financing)

NPF yang tinggi akan memperbesar biaya,sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas pinjaman bank menyebabkan jumlah pinjaman bermasalah semakin besar,dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank.rumus menghitung NPF yaitu :

$$\text{NPF} = \frac{\text{PEMBIAYAAN BERMASALAH}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}} \times 100$$

## 3.FDR (Financing to Deposit Ratio)

FDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank.apa bila hasil pengukuran jauh berada diatas target dan limitnya,berarti tertutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pendapatan bank.semakin tinggi FDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pinjaman dengan efektif,sehingga jumlah pinjaman macetnya akan kecil).rumus untuk menghilangkan FDR yaitu :

$$\text{FDR} = \frac{\text{PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN}}{\text{DANA PIHAK KE TIGA}} \times 100$$

#### 4. BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional)

BOPO merupakan rasio efisiensi bank yang mengukur beban operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin tinggi nilai BOPO maka semakin tidak efisien operasi bank.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{BEBAN OPERASIONAL}}{\text{PENDAPATAN OPERASIONAL}} \times 100$$

#### 2.10 Penelitian terdahulu

Sebagai panduan peneliti dalam melakukan penelitian ini maka dibutuhkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dilampirkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Penelitian terdahulu**

NO	Nama penelitian	Judul	Variabel yang digunakan dependen dan independen	Metode Analisis	Hasil Kesimpulan



NO	Nama Judul penelitian	Variabel yang digunakan dependen dan independen	Metode Analisis	Hasil Kesimpulan
1.	Ilhami dan Husni Thamrin (2021). Analisis dampak covid-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia	Non performing financing (NPF). Capital adequacy ratio (CAR), Return on assets (ROA), financing to deposit ratio (FDR).	Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama.
2.	Lica Miana, Nonie Afrianty, dan Asnaini (2021). Dampak covid-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia menggunakan pendekatan sharia maqasid index (SMI) periode juni 2019-juni 2020	Sharia maqasid index (SMI). Maqasid syariah.	Mengkombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif	Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

NO	Nama penelitian	Judul	Variabel yang digunakan dependen dan independen	Metode Analisis	Hasil Kesimpulan
3	Yudi wicaksono,binti maimunah (2021). Peran Negara dalam ketahanan perbankan syariah di masa pandemi covid-19	krisno	Equity financing. lease financing.	Mengunaka n pendekatan yuridis normatif dengan metode berupa studi kepustakaan	Proses penghimpunan dana bank syariah dilakukan dengan prinsip equity financing,lease financing serta setoran modal yang dimasukan dalam polling fund.
4.	Mia wahyuni darsono,Djoko setyadi dan anisa kusumawardani (2021). Pengaruh pembiayaan debt financing dan equity financing serta lease financing terhadap profitabilitas	puji	equity financing. Debt financing,lease financing,rasio profitabilitas bank.	Pendekatan kuantitatif	Penyediaan uang atau kewajiban yang disamakan,berdasa rkan kesepakatan anatar bank dengan pihak lain serta mewajibkan pihak yang dibiayain untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

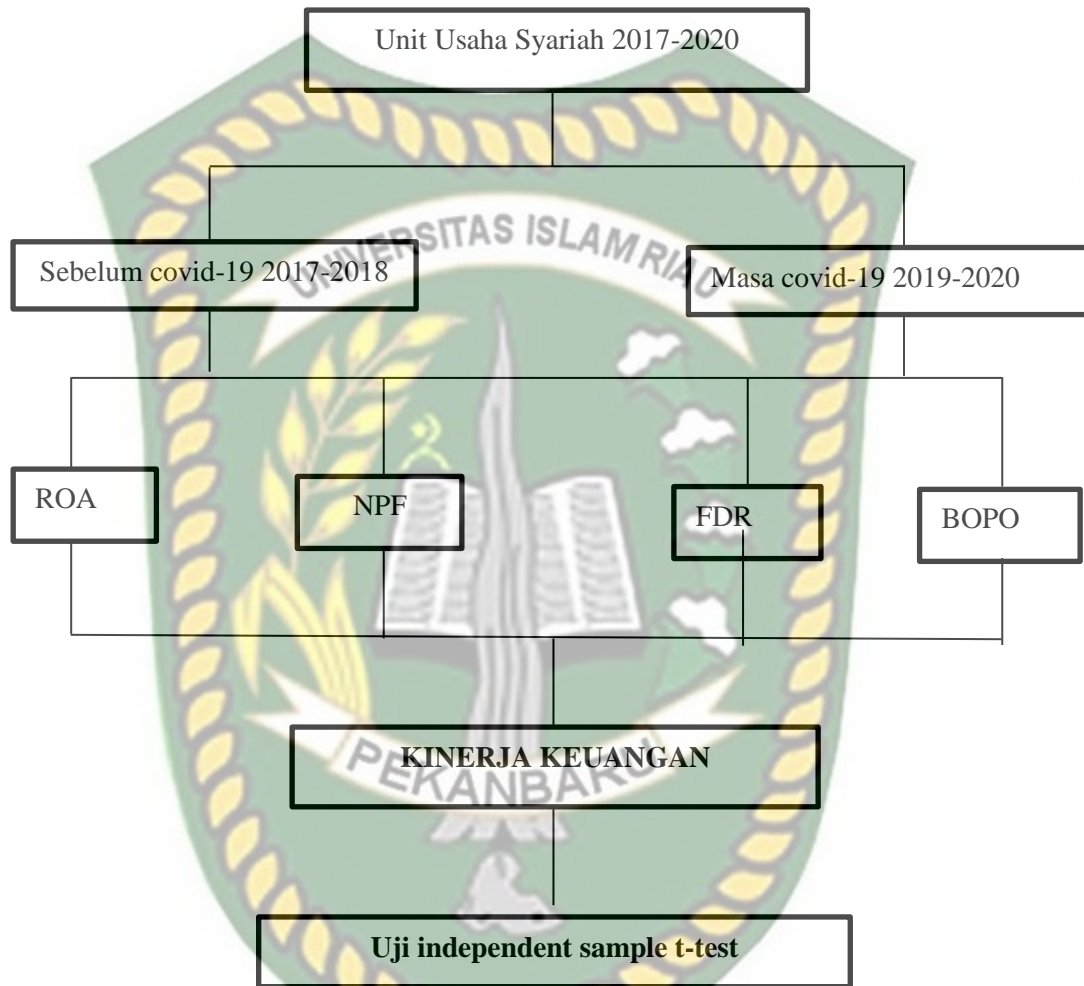
NO	Nama Judul penelitian	Variabel yang digunakan dependen dan independen	Metode Analisis	Hasil Kesimpulan
	dengan non performing financing (NPF) sebagai variable moderating pada bank umum syariah di Indonesia.			jangka waktu tertentu dengan margin atau bagi hasil.
5.	Annisa nur safitri,muhamad ikbal fasa,Suharto (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap perkembangan dan prospek perkembangan perbankan syariah	equity financing. Debt financing.	Kualitatif dijabarkan secara deskriptif	Berdasarkan analisis debt financing mengalami penurunan yang cukup konstan pada masa pandemi sedangkan equity financing mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan stabil.

NO	Nama Judul penelitian	Variabel yang digunakan dependen dan independen	Metode Analisis	Hasil Kesimpulan
6.	Analisis pengaruh CAR,NPF,FDR,BOPO dan INFLASI terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia : studi masa pandemic covid-19	CAR,NPF,FD R, BOPO dan INFLASI	Deskriptif kuantitatif	Variabel ini mencakup CAR,FDR,NPF BOPO ,dan INFLASI.kinerja Ini telah dilakukan oleh peneliti bank syariah

### 2.11 kerangka pemikiran

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dan setelah melihat,membaca dari penelitian terdahulu maka penulis membuat kerangka pemikiran dalam peneitian ini sebagai berikut :

**Gambar 2.2**  
**kerangka pemikiran**



### 2.12 Hipotesis

diduga kinerja keuangan unit usaha syariah menunjukkan baik 2017-2018  
 sedangkan pada tahun 2019-2020 kondisi kurang baik.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi dan objek penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah industri perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari unit usaha syariah yang terdaftar di bank Indonesia

#### 3.2 Defenisi operasional variabel unit usaha syariah

##### 1. Variabel independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dipenelitian ini

1. non performing financing (NPF) adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektabilitas, kurang lancar, diragukan, dan macet.

2. financing to deposit ratio (FDR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana dalam kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat.

3. biaya operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional.

## 2. Variabel bebas dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

1. Return on assets (ROA) adalah merupakan salah satu rasio profitabilitas dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang

### 3.3 Operasional variabel

**Tabel 3.1**  
**Operasional tabel**

NO	Variabel	Skala	Pengukuran
1.	Non performing financing(X1)	Rasio variabel independen	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$
2.	Financing to deposit ratio(X2)	Rasio variabel independen	$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$
3.	Biaya operasional dan	Rasio variabel independen	$BOPO = \frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan operasional}}$

NO	Variabel	Skala	Pengukuran
	pendapatan operasional(X3)		
4.	Return on assets(X4)	Rasio variabel dependen	$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Aset}}$

### 3.4 Populasi dan sampel

#### A. Populasi

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 20 unit usaha syariah di Indonesia sebelum masa pandemi (2017-2018) dan selama masa pandemi (2019-2020). penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.

#### B. Sampel

Sampel yang digunakan untuk pengambilan penelitian adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi yang digunakan untuk penelitian. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik tahunan pada unit usaha syariah sebelum pandemi (2017-2018) dan masa pandemi (2019-2020) sebanyak 20 sampel bank unit usaha syariah.



**Tabel 3.2**

**Sampel unit usaha syariah**

No	Nama Bank
1	Bank Danamon,Tbk
2	Bank Permata,Tbk
3	Bank Maybank Indonesia,Tbk
4	Bank CIMB Niaga,Tbk
5	Bank OCBC NISP,Tbk
6	Bank sinarmas,Tbk
7	Bank Tabungan Negara(Persero),Tbk
8	BPD DKI
9	BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10	BPD Jawa Tengah
11	BPD Jawa Timur,Tbk
12	BPD Sumatera utara
13	BPD Sumatera barat
14	BPD Jambi
15	BPD Riau dan Kepulauan Riau
16	BPD Kalimantan Selatan
17	BPD Kalimantan Barat

No	Nama Bank
18	BPD Kalimantan Timur
19	BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
20	BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

### 3.5 Jenis dan sumber data

#### A. Jenis data

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

#### B. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara ( data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip baik dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Peneliti memperoleh data sekunder langsung dari laporan situs resmi bank Indonesia dan statistik perbankan syariah ojk,yaitu laporan keuangan unit usaha syariah periode 2017-2018 masa pandemi dan sebelum masa pandemi 2019-2020

### **3.6 Teknik pengumpulan data**

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi.dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu,dokumen bisa berbentuk tulisan,atau gambar.metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel,berupa catatan,laporan keuangan dan lainnya.

Dokumen yang digunakan adalah data yang diperoleh dari laporan publikasi unit usaha syariah yang menjadi sampel atau situs resmi bank Indonesia (BI).laporan statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh situs resmi bank Indonesia dan mendownload data data terkait dengan penelitian ini.

### **3.7 Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif,dan uji analisis statistik compare mean : independend sample t-test one way :

a.analisis deskriptif,penganalisaan ini diambil dari rincian laporan keuangan unit usaha syariah meliputi laporan laba rugi,dan posisi keuangan neraca,dari laporan ini nantinya akan dihitung dan dicari rasionya lalu,hasilnya akan di

analisis untuk mengukur kemampuan kinerja keuangan unit usaha syariah. data ini akan diolah dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio Return On assets (ROA), Non Performing Financing (NPF), Financing deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).

b. uji independent sample t-test atau yang disebut dengan uji t sample tidak berpasangan atau berhubungan yang disebut dengan sampel bebas. ini bisa terlihat dari independent yang artinya merupakan tidak ada keterkaitan atau hubungan antara dua sample t-test ini, rumus sebuah definisi umum bahwa uji independent sample t-test merupakan analisis statistik yang memiliki tujuan untuk membandingkan dua sample yang tidak saling berpasangan dan untuk melihat mana yang terbaik, dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  dan uji satu arah. rumus dengan langkah secara manual uji independent sample t-test (uji-t) :

$$t \text{ hitung} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}} \left( n \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)$$

berdasarkan rumus tersebut nilai yang harus terlebih dahulu disiapkan

$\bar{x}_i$  : adalah rata-rata skor/nilai kelompok i

$N_i$  : adalah jumlah responden i

$S_i^2$  : adalah variance skor kelompok i

Hipotesis statistik dalam menentukan penemuan hipotesis :

$$H_0: \mu_1 \leq \mu_2 = 0$$

$$H_0: \mu_1 \geq \mu_2 \neq 0$$

$H_0$  :tidak signifikan antara kinerja unit usaha syariah

$H_1$ :terjadi signifikan antara kinerja unit usaha syariah

Hipotesis diterima jika hitung berada didalam hipotesis,dengan nilai  $\alpha = 5\%$  dan uji satu arah (one way).

-jika nilai sig.2-tailed  $>0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak,artinya tidak terjadi signifikan pada kinerja unit usaha syariah.

-jika nilai sig.2-tailed  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima,artinya terjadi signifikan terhadap unit usaha syariah.

Pengambilan keputusan dengan perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel sebagai berikut:

a.jika  $T$  hitung  $< T$ -tabel maka  $H_0$  diterima sedangkan  $H_a$  ditolak,artinya tidak terjadinya signifikan terhadap unit usaha syariah.

b.jika  $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, terjadi signifikan terhadap kinerja unit usaha syariah.



#### **BAB IV**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

## 4.1 Unit Usaha Syariah

### 4.1.1 Sejarah Unit Usaha Syariah

Mulanya unit usaha syariah adalah bagian dari bank syariah yang pertama di Indonesia bank muamalat Indonesia. perkembangan bank muamalat Indonesia masih tergolong stagnan pada tahun 1992 hingga 1999. namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa bank muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. para bankir berpikir bahwa BMI satu satunya bank syariah Indonesia yang tahan terhadap krisis moneter.

Pada tahun 1999, berdirilah bank syariah mandiri yang merupakan konversi dari bank susila bakti tersebut merupakan bank konvensional yang dibeli oleh bank dagang negara, yang kemudian dikonversikan bank syariah mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.

Sedangkan pada tahun 1991 hingga sekarang bank muamalat Indonesia kemudian lahir sebagai kerja tim perbankan MUI dan mulai beroperasi penuh setahun kemudian. pada periode ini pemerintah mengeluarkan undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil. dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah menyediakan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. ketentuan ini menandai dimulainya era

sistem perbankan ganda (dual banking sistem) di Indonesia.yaitu beroperasinya sistem perbankan dengan sistem bagi hasil.

Kemudian pada tahun 1998,terjadi perubahan pada undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menjadi undang-undang no 10 tahun 1998.perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia.berdasarkan undang-undang ini,bank umum-umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,yaitu melalui pembukaan unit usaha syariah (UUS).bank umum dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut.

#### **4.1.1.1 Visi dan Misi Unit Usaha Syariah**

##### **A.Visi**

menjadi bank terkemuka yang memberikan keberkahan bagi masyarakat daerah.

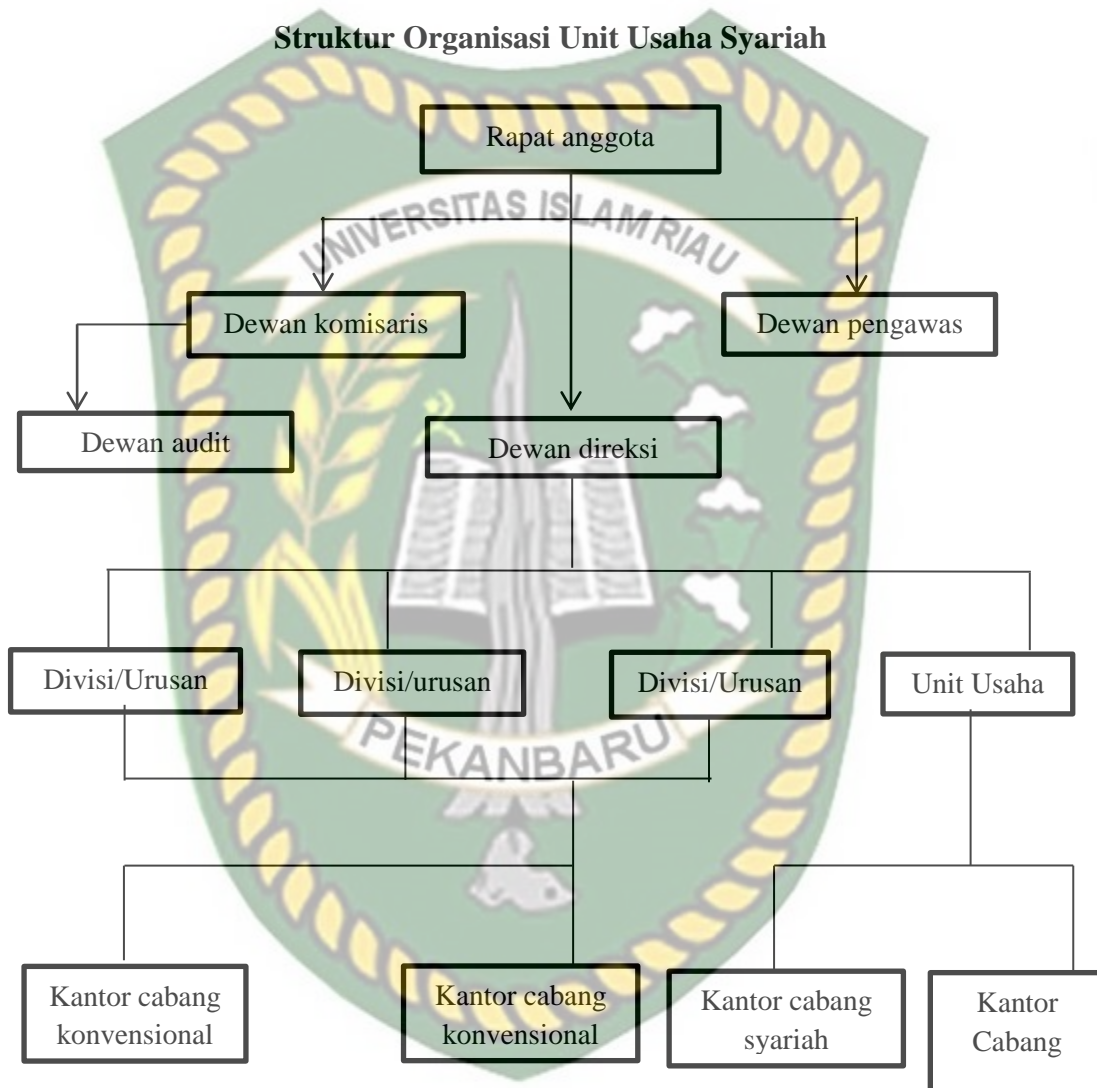
##### **b.Misi**

menyediakan produk dan layanan perbankan syariah yang inovatif yang memuaskan bagi seluruh pemangku kepentingan kerja yang kondusif.



#### 4.1.2 Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah

Tabel 4.1



#### 4.1.3 Sejarah Bank Permata

Permata bank merupakan salah satu bank nasional terbesar di Indonesia dan dikenal sebagai bank dengan pelayanan terbaik. Permata Bank dibentuk sebagai

hasil merger dari 5 Bank dibawah badan penyehatan perbankan nasional BPPN,yakni Pt Bank Bali,Pt Bank Universal,Pt Bank Prima Expres,Pt Bank Artamedia dan Pt Bank Patriot,yangb prosesnya berhasil diselesaikan pada tahun 2002.pada tahun 2004,standard chartered Bank dan Pt astra internastional Tbk mengambil Pt Bank permata dan mulai proses transformasi besar besaran di dalam organisasi.selanjutnya,sebagai wujud komitmennya terhadap permata bank kepemilikan gabungan pemegang saham utama ini meningkat menjadi 89,0 pada tahun 2006.pelayan primaPermata Bank meliputi produk keuangan yang lengkap dan inovatif,kemudahan dan keamanan bagi nasabah yang ditunjang oleh teknologi informasi.pada tahun 2007,jaringan permata bank telah berkembang dengan pesat.saat ini bank memiliki jaringan outlet yang sangat luas,mencakup 253 kantor cabang termasuk kantor cabang pembantu dan kantor kas,kantor cabang syariah,lebih dari 200office channeling syariah dan 552 ATM di 46 kota diseluruh Indonesia.

#### 4.1.3.1 Visi dan Misi Bank Permata

##### A.Visi

Menjadi jasa keuangan terkemuka di Indonesia,yang memiliki focus pada segmen usaha kecil menengah UKM dan costumers.

### **B.Misi**

- 1.menjadi mitra pilihan melalui kesempurnaan pelayanan dan pemberian solusi yang optimal.
- 2.turut serta mendorong pengembangan profesionalisme dan kepribadian.
- 3.aktif berpartisipasi dalam upaya mewujudkan kontribusi yang bermanfaat.
- 4.memberikan investasi terbaik bagi pemegang saham.
- 5.menjadi panutan dalam penerapan tata kelola perusahaan dan asas ketaatan yang baik.

#### **4.1.4 Sejarah Bank Maybank Indonesia**

Pt Maybank Indonesia adalah salah satu Bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan banking berhad (Maybank),salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN.sebelumnya,Maybank Indonesia bernama Pt Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 mei 1959,mendapat izin sebagai Bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka ddi bursa efek Jakarta dan Surabaya(sekarang menjadi BEI) pada 1989.

Perdesember 2020 Maybank Indonesia memiliki 361 cabang termasuk cabang syariah yang tersebar di Indonesia serta satu cabang diluar negeri(Mumbai,india),22 mobil kas keliling dan 1.428 ATM termasuk 79 CDM(cash deposite machine) yang terkoneksi lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam jaringan ATM prima,ATM BERSAMA,ALTO,CIRRUS,dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di singapura,Malaysia,dan brunei.Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar Rp.115,0 Triliun dan memiliki total asset senilai Rp.173,2 Triliun pada akhir desember 2020.

#### **4.1.4.1 Visi dan Misi Bank Maybank Indonesia**

##### **A.visi**

Menjadi penyedia layanan keungan terkememuka di Indonesia,yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas.

##### **B.Misi**

- 1.menyediakan akses yang nyaman untuk masyarakat untuk mendapatkan produk dan layanan perbankan.
- 2.memberikan persyaratan dan harga wajar
- 3.memberikan advice kepada nasabah berdasarkan kebutuhan.
- 4.berada ditengah komunitas.

#### 4.1.5 Sejarah Bank Cimb Niaga

Bank niaga pertama kali didirikan pada tanggal 26 september 1995 sebagai bank swasta nasional.setelah terbentuk,membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme karyawan menjadi perhaian utama bank,pada tahun 1969,ketika sektor swasta di Indonesia dilanda krisis,Bank Niaga mampu bertahan dan berhak memperoleh jaminan dari Bank Indonesia.Bank Niaga kemudian merevisi rencana usahanya pada tahun 1974,dan berganti menjadi bank umum agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah.

Pada tahun 1976 Bank Niaga meluncurkan program kredit professional,yaitu pinjaman bagi para profesional seperti ahli teknik,dokter,dan sebagainya.selanjutnya,pada ahun 1981-1982,Bank Niaga menjadi Bank pertama di Indonesia yang menerapkan sistem perbankan jaringan (online) dan sistem jaringan kantor cabang.langkah berikut yang diambil Bank Niaga adalah membentuk jaringan unit usaha penukaran valuta asing resmi di sejumlah kantor cabang pada tahun 1985 beserta beragam produk baru.pada tahun 1987 ,Bank Niaga membedakan dirinya dari pesaingnya dipasar domestik dengan menjadi bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM Indonesia.pada juni 1989 merupakan tahun Bank Niaga melakukan penawaran saham perdana sehingga menjadi perusahaan terbuka.Bank Niaga mulai menyediakan layanan bagi nasabah kelas menengah atas pasa tahun 1998.pada tahun 1999,Bank niaga menjadi Bank dibawah pengawasan badan

penyehatan perbankan nasional (BPPN) karena dana pemegang saham untuk rekapitalisasi kurang dari 20%.

CIMB Grup berkantor pusat di Kuala Lumpur, dan beroperasi di 8 dari 10 negara anggota ASEAN (Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Kamboja, Brunei, Vietnam, dan Myanmar). Selain di kawasan ASEAN CIMB Grup mendirikan kantor di China, Hongkong, Bahrain, India, Sri Lanka, Amerika Serikat, dan Inggris. Saham CIMB Grup tercatat di Bursa Malaysia melalui CIMB Group Holdings Berhad. Nilai kapitalisasi pasar kelompok usaha ini mencapai RM 57,2 miliar per 31 Maret 2012. Karyawannya berjumlah lebih dari 40.000 orang yang tersebar di 14 negara.

#### **4.1.5.1 Visi dan Misi Bank CIMB Niaga**

##### **A. visi**

1. Menjadi pelaku perbankan syariah terkemuka di Indonesia dan regional yang memiliki kekhasan dalam budaya layanan.
2. Menjadikan Indonesia sebagai basis perkembangan bisnis perbankan syariah sebagai bagian dari visi Pt Bank CIMB Niaga Tbk.
3. Unggul dalam pengembangan bisnis dan akselerasi agenda integritas ASEAN.

##### **B. Misi**

- 1.fokus pada Visi 2015,yaitu akselerasi pengembangan bisnis perbankan syariah dilingkungan CIMB Niaga,CIMB Islamic,dan grup CIMB dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar perbankan syariah dengan potensi terbesar.
- 2.implementasi dual system banking secara penuh dengan menjadikan bisnis perbankan syariah sebagai indikator kinerja utama bagi seluruh unit bisnis dan pendukung.
- 3.penguatan kebijakan sumber daya manusia berorientasi dual system banking.
- 4.penyelarasan bisnis dengan mengkapitalisasi kekuatan Pt Bank CIMB Niaga dan CIMB Group secara regional.
- 5.penekanan berkelanjutan mengenai pentingnya Indonesia sebagai basis pengembangan bisnis perbankan syariah agar CIMB Niaga syariah dapat menjadi pelaku industry perbankan syariah terkemuka dan terbesar di Indonesia.

#### 4.1.6 Sejarah Bank OCBC Nisp

Sejak tahun 2004,OCBC Bank-singapura saat ini memiliki saham sebesar 85.06 di Bank OCBC Nisp Tbk.dengan dukungan dari OCBC Bank-

singapura, Bank OCBC Nisp Tbk telah menetapkan program yang agresif untuk memperkuat infrastruktur, termasuk sumber daya manusia teknologi informasi dan jaringan kantor. Program ini kemudian memicu perpindahan kantor pusat ke Bank OCBC Nisp Tbk Tower di pusat Jakarta, yang memungkinkan Bank OCBC Nisp Tbk memiliki akses langsung ke pusat bisnis di Indonesia. Bank OCBC Nisp Tbk saat ini memiliki lebih dari 6.000 karyawan yang memiliki motivasi tinggi untuk melayani nasabah di 408 kantor yang meliputi 88 kota di Indonesia. Profil pemegang saham pengendali, OCBC Bank Singapura merupakan bank lokal tertua di Singapura, dengan jaringan, kantor perwakilan serta perusahaan afiliasi di 15 negara (Singapura, Malaysia, Indonesia, Cina, Hongkong, Brunei, Jepang, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat). Anak perusahaan OCBC Bank, Great Eastern Holding adalah grup asuransi terbesar di Malaysia dan Singapura dalam hal aset dan pangsa pasar.

#### **4.1.6.1 Visi dan Misi Bank OCB Nisp**

##### **A. visi**

Menjadi bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya.

##### **B. Misi**



1. menyediakan dan pengembangan pelayanan keuangan yang inovatif,berkualitas,dan melebihi harapan masyarakat yang dinamik dengan hasil terbaik.
2. membina jejaring kerjasama saling menguntungkan yang dilandasi rasa saling percaya.
3. menciptakan lingkungan kerja yang meningkatkan profesionalisme dan mendorong pembaharuan organisasional dengan semangat kekeluargaan.
4. membangun kepercayaan public melalui etikal,peduli dan hati-hati.

#### **4.1.7 Sejarah Bank Sinarmas**

Pt Bank Sinarmas Tbk didirikan pada 18 agustus 1989 berdasarkan akta No.52 18 agustus 1989 dari buniarti Tjandra,SH.,Notaris dijakarta,dengan nama Pt Bank Shinta Indonesia dan telah diubah dengan akta No.91 tanggal 15 september 1989 dari notaris yang sama.

Bank memperoleh status sebagai Bank Umum Devisa tahun 1995.Tahun 2005,perjalanan Bank memasuki babak baru setelah Pt sinarmas multiartha Tbk.,perusahaan financial services yang berada dibawah kelompok usaha Sinarmas mengambil alih 21% saham di Pt Bank Shinta Indonesia.

Pada desember 2006 Bank berganti nama menjadi Bank sinarmas.pergantian nama tersebut telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang

tertuang dalam akta No.tanggal 21 November 2006 dari triphosa lily eka dewi,.SH.,Notaris dijakarta.

Pada ahun 2009,Bank Sinarmas mendapatkan izin untuk pendirian Unit Usaha Syariah (UUS),berdasarkan keputusan Depui Gubernur Bank Indonesia NO 11/13/KEP.

Pada 13 desember 2010 Bank Sinarmas melakukan penawaran saham umum perdana dengan struktur permodalan sebesar Rp.728 miliar waran seri I.adapun korporasi yangbdilakukan Bank Sinarmas setelah IPO sebagai berikut :Tahun 2012 Bank melakukan penawaran umum terbatas I dan dengan mengeluarkan waran seri II,tahun 2014 Bank melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD),tahun 2016 Bank melakukan penawaran umum terbatas II dan dengan mengeluarkan waran seri III.

#### **4.1.7.1 Visi dan Misi Bank Sinarmas**

##### **A.Visi**

Menjadi Bank terkemuka di Indonesia dengan jaringan distribusi yang terintegrasi dan layanan prima.

##### **B.Misi**

1. Memperluas jaringan kantor untuk penetrasi pasar dan pembiayaan pada sentra-sentra konsumen, UKM dan sektor usaha skala korporasi.
2. Memperluas basis nasabah ,mulai dari nasabah kecil hingga korporasi, melalui kerjasama dengan lembaga keuangan maupun mitra keuangan lainnya
3. meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam rangka memberikan layanan terbaik melalui payment system yang lengkap.
4. Membudayakan sistem manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Government (GCG).

#### **4.1.8 Sejarah Bank Tabungan Negara (BTN)**

Bank BTN adalah badan usaha milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak dibidang jasa keuangan perbankan. cikal bakal Bank BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank di Batavia pada tahun 1987, pada masa pemerintah belanda. pada 1942 postspaarbank diambil alih pemerintah jepang dan diganti namanya tyokin kyoku. setelah kemerdekaan diproklamasikan, maka tyokin kyoku diambil alih oleh pemerintah Indonesia, dan namanya diubah menjadi kantor tabungan pos RI. usai dikukuhkannya, Bank tabungan pos RI ini sebagai satu satunya lembaga tabungan di Indonesia. pada tanggal 9 februari pemerintah mengganti namanya dengan nama Bank Tabungan

Pos.berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.4 tahun 1963 lembaran Negara republik Indonesia No.62 tahun 1963,maka resmi sudah nama Bank Tabungan Pos diganti namanya menjadi Bank Tabungan Negara.dalam periode ini posisi bank BTN telah berkembang dari sebuah unit menjadi induk yang berdiri sendiri.kemudian sejarah Bank BTN mulai diukir kembali dengan ditunjuknya oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 29 januari 1974 melalui surat menteri keuangan RI.pada ahun 1992 status Bank BTN ini menjadi PT.Bank BTN(persero) karena sukses Bank BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsi sebagai bank umum (komersial).sukses Bank BTN dalam bisnis KPR juga telah meningkatkan status Bank BTN sebagai Bank konvensional menjadi Bank Devisa pada tahun 1994.berdasarkan kaian konsultan independent,price water house coopers,pemerintah melalui menteri BUMN dalam surat No.5-544/MMBU/2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank umum fokus bisnis pembiayaan perrumahan tanpa subsidi.kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap Bank BTN telah mengantarkan kami mendapatkan penghargaan dalam ajang anugerah perbankan Indonesia VI 2017 sebagai peringkat 1 bank terbaik Indonesia 2017.

#### **4.1.8.1 Visi dan Misi Bank BTN**

##### **A.Visi**

Menjadi the best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025

## B.Misi

- 1.secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
- 2.mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyedia rumah yang layak.
- 3.menjadi home of indonesia's best talent.
- 4.meningkatkan share holder value dengan berfokus pertumbuhan profitabilitas.
- 5.menjadi mitra keuangan.

### 4.1.9 Sejarah Bank Danamon, Tbk

Bank danamon didirikan pada tahun 1956,Pt Bank Danamon Indonesia,Tbk.merupakan salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia,dengan jaringan tersebar diwilayah aceh hingga papua.per 30 juni 2016,Bank Danamon mencatatkan aset sebesar 175 Triliun,1.900 kantor cabang dan kantor pusat pelayanan,terdiri dari kantor cabang konvensional,unit Danamon simpan pinjam,unit syariah,serta kantor cabang anak perusahaan,adira.Danamon menyediakan akses ke 1.454 ATM dan 70 CDM,sera puluhan ribu ATM melalui kerjasama dengan jaringan ATM bersama,ALTO,dan prima yang tersebar di 34

provinsi Indonesia. selain itu pada tahun 2015 Danamon melalui unit usaha syariah. meluncurkan produk terbaru yaitu tabungan BISA umrah IB Tabungan. tabungan rencana dengan akad mudharabah (bagi hasil) dirancang khusus untuk persiapan ibadah umrah. sebagai bank komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap layanan keuangan, Danamon secara konsisten melakukan berbagai inisiatif dan kegiatan edukasi perbankan serta keuangan kepada masyarakat umum. per 31 juni 2016 67,37% saham Danamon dimiliki oleh asia financial pte. ltd 6,69% oleh jpmcb-franklin templeton investment funds, dan 25,94% dimiliki oleh publik.

#### **4.1.9.1 Visi dan Misi Bank Danamon**

##### **A. Visi**

Kami peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan, Danamon bertujuan menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia yang keberadaannya diperhitungkan.

##### **B. Misi**

Kami adalah menjadi organisasi yang berorientasi ke nasabah, yang melayani semua segmen, dengan menawarkan nilai yang unik masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dengan didukung oleh teknologi kelas dunia.

#### 4.2.1 Sejarah BPD DKI

Bank DKI didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” pada tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan dihadapan Eliza Pondaag S.H, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. J.A 5/31/13 Tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register kantor pengadilan negeri Jakarta No.1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam tambahan No.206 Berita Negara Republik Indonesia No.41 tanggal 1 Juni 1962. Pada tanggal 21 Agustus 1978 tentang Bank Pembangunan Daerah Jakarta (BPD DKI Jakarta). Berdasarkan peraturan daerah no.1 tahun 1992, Bank DKI memperoleh izin untuk melakukan aktivitas sebagai Bank devisa berdasarkan keputusan Direksi Bank Indonesia no.25/67/KEP/DIR. pada tanggal 1 Februari 1999, pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham menerbitkan peraturan daerah provinsi DKI Jakarta. Pada 16 Maret 2004, Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah berdasarkan surat Bank Indonesia No.6/39/Dpbs. Bank DKI melakukan perubahan anggaran dasar termasuk penambahan modal dasar menjadi Rp 1.500.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam akta No.21 tanggal 12 September 2008 tentang pernyataan keputusan notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S. pada tanggal 5 November 2012 tentang pernyataan keputusan rapat PT Bank DKI oleh notaris Nannete Cahyanie Handari Adi Warsito S.H notaris di Jakarta.

#### 4.2.1.1 Visi dan Misi Bank DKI

##### A. Visi

Menjadi Bank pilihan untuk Jakarta maju dan sejahtera.

##### B. Misi

Mendukung pertumbuhan Jakarta melalui pengembangan UMKM, kemudahan transaksi dan mewujudkan sistem transaksi non-tunai.

#### 4.2.2 Sejarah Bank Daerah Istimewa Yogyakarta

Bank BPD DIY didirikan pada tahun 1961, tanggal 16 Desember berdasarkan akta notaris no.11 notaris R.M Soerjanto Partaningrat sebagai suatu perusahaan daerah, pertamakalinya Bank BPD DIY diatur melalui peraturan daerah no.3 tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian. Saat ini landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah peraturan daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta no.2 tahun 1993, junctis peraturan daerah no.11 tahun 1997 dan no.7 tahun 2000. Tujuan pendirian Bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas



daerah,dan sebagai salah satu sumber pendapatan serta menjalankan usahanya sebagai bank umum.

#### 4.2.2.1 Visi dan Misi Bank BPD DIY

##### A.Visi

Menjadi bank terpercaya,istimewa dan Bank pilihan masyarakat

##### B.Misi

- 1.menyediakan solusi kebutuhan keuangan masyarakat dengan memberikan pengalaman perbankan yang berkesan.
- 2.menjalankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan bisnis yang beretika untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- 3.mencapai SDM yang unggul,berintegritas dan professional.
- 4.mengembangkan keunggulan kompetitif dengan layanan prima dan produk yang inovatif.
- 5.menjalankan fungsi agen pembangunan yang fokus mengembangkan sektor UMKM.

#### 4.2.3 Sejarah BPD Jawa Tengah

Bank pembangun daerah jawa tengah didirikan disemarang berdasarkan surat persetujuan menteri pemerintahan umum dan otonomi daerah No.DU 57/1/35 tanggal 13 maret 1963 sebagai landasan operasional jawa tengah.operasional pertama dimulai pada tanggal 6 april 1963 dengan menempati gedung bapindo jl.pahlawan No.3 semarang sebagai kantor pusat.

Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil.

Sampai akhirnya pada tahun 1999,berdasarkan peraturan jawa tengah No.6 tahun 1998 dan akte pendirian No 1 tanggal 1 mei 1999,bank kemudian berubah menjadi perseroan terbatas.pada tanggal 7 mei 1999,Pt bank BPD jawa tengah mengikuti program rekapitalisasi perbankan.pada tanggal 7 mei 2005,Pt BPD jawa tengah menyelesaikan program rekapitalisasi,disertai pembelian kembali kepemilik saham yang dimiliki pemerintah pusat oleh pemerintah provinsi jawa tengah dan kabupaten sejawa tengah.

#### **4.2.3.1 Visi dan Misi BPD Jawa Tengah**

### **A.visi**

Bank terpercaya,menjadi kebanggaan masyarakat,mampu menunjang pembangunan daerah.

### **B.Misi**

- 1.Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan sdm dengan teknologi modern,serta jaringan yang luas.
- 2.membangun budaya bank dan mempertahankan bank sehat.
- 3.mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking.
- 4.meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank.

#### **4.2.4.Sejarah BPD Jawa Timur Tbk**

Bank Pembangunan Daerah jawa timur Tbk didirikan pada tanggal 17 agustus 1962 tentang ketentuan pokok BPD,maka pemerintah daerah tingkat 1 jawa timur mengeluarkan peraturan daerah No.2 tahun 1976.peraturan pemerintah daerah disahkan oleh mentri dalam negeri dengan surat keputusan No.pem10/5/26-18 tanggal 31 januari 1977 dan diumumkan dalam lembaran daerah provinsi daerah tingkat 1 jawa timur tahun1997 seri c No1/c tanggal 1 frebruari 1997.peraturan daerah tersebut beberapa kali perubahan,dan terakhir yang diubah dengan peraturan daerah No 11 tahun 1996,tanggal 30 desember 1996 yang disahkan oleh

mentri dalam negeri pada tanggal 21 april 1997.dengan pengesahan peraturan daerah no.1 tahun 1999 oleh DPRD Provinsi Jawa timur pada tanggal 20 maret 1999.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai surat keputusan menteri keuangan republic Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 agustus 1961.sedangkan unit usaha syariah dibentuk mulai beroperasi sejak tanggal 21 agustus 2007 dengan sesuai surat persetujuan prinsip pendirian UUS dari bank Indonesia No.9/75/Ds/sb tanggal 4 april 2007.Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan SK direksi bank Indonesia (BI)No.23/28/KEP/DIR 2 agustus 1990.

#### **4.2.4.1 Visi dan Misi BPD Jawa Timur**

##### **A. Visi**

Menjadi BPD No.1 Indonesia.

##### **B. Misi**

- 1.akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju dgital bank dengan SDM yang berdaya saling tinggi.
- 2.memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi jawa timur.
- 3.menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

#### 4.2.5 Sejarah BPD Sumatera Utara

Bank pembangunan daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPSU. Sesuai dengan ketentuan pokok BPD tingkat 1 Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp 100.000.000 dengan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah daerah tingkat 2 se Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, modal dasar pada saat itu menjadi Rp 400 M yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, ditahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi 500 M, untuk itu modal dasar bank Sumut kembali ditingkatkan dari Rp 1 Triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 2 Triliun pada tahun 2011 dengan total aset meningkat menjadi 18,95 Triliun.

##### 4.2.5.1 Visi dan Misi BPD Sumatera Utara

###### A. Visi

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

###### B. Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

#### **4.2.6 Sejarah BPD Sumatera Barat**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi didirikan pada 12 maret 1962 yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi dipadang.pendirian ini dipelopori oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin bisnis masyarakat dan pemimpin bisnis swasta disumatera barat berdasarkan pemikiran perlunya lembaga keuangan dalam bentuk bank,yang secara khusus membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan didaerah disahkan oleh keputusan menteri keuangan pertama Indonesia dan modal awal BPD sumatera barat Rp 50 juta.perubahan nama Bank pembangunan daerah sumatera barat dirubah menjadi Bank nagari yang dibuat dihadapan notaris Helsi Yasin S.H pada tanggal 21 juli 2021 dan akta tersebut telah mendapat persetujuan menteri hukum dan HAM republic Indonesia pada tanggal 19 agustus 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Pt.Bank Nagari.

##### **4.2.6.1 Visi Dan Misi BPD Sumatera Barat**

###### **A.Visi**

Untuk menjadi Bank Pembangunan Daerah terkemuka dan terpercaya di Indonesia.

## **B.Misi**

Berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

### **4.2.7 Sejarah BPD Jambi**

Bank jambi merupakan Bank yang didirikan berdasarkan akta notaris Adiputra Parlindungan No.6 tanggal 12 february 1959 dengan nama Pt Bank Pembangunan Daerah jambi yang kemudian disempurnakan melalui akte notaris Habro Poerwanto No.70 tanggal 12 oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari hakim republic Indonesia dan dimuat pada tanggal 29 desember 1959.sejak tanggal 22 november 2007 BPD Jambi menjadi perseroan terbatas pada tahun 2006 dan berdasarkan akte notaris Robert Faisal SH No.1 tanggal 1 february 2007.diumumkan dalam tambahan berita Negara republic Indonesia pada tanggal 10 julin 2007 serta keputusan gubernur bank Indonesia pada tanggal 13 novemmer 2007.

#### **4.2.7.1 Visi Dan Misi BPD Jambi**

##### **A.Visi**

Menjadi Bank ideal dan sehat berkontribusi nyata untuk perekonomian jambi khususnya mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan layanan berbasis digital dan berkelanjutan serta dikelola secara professional,dengan prinsip kehati-hatian.

#### **B.Misi**

- 1.mengedepankan bisnis berbasis layanan digital
- 2.pemegang kas daerah dan melaksanakan penyimpanan keuangan daerah
- 3.mendorong perekonomian masyarakat provinsi jambi melalui digitalisasi UMKM.
- 4.menciptakan SDM yang profesional,berintegritas,berakhlak.
- 5.sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD)

#### **4.2.8 Sejarah BPD Riau dan Kepulauan Riau**

Bank Pembangunan daerah Riau dan Kepri didirikan pada tahun 1962 terhitung tanggal 01 april 1966 secara resmi kegiatan BPD dengan status Bank milik pemerintah daerah Riau.perubahan bentuk hukum tersebut telah dibuat dengan akta notaris Muhammad Dahad Umar,SH notaris diPekanbaru No 36 tanggal 18 januari 2003 yang telah disahkan oleh menteri kehakiman dan HAM dengan surat keputusan tanggal 5 mei 2003.perubahan badan hukum tersebut disahkan dalam RUPS tanggal 13 juni 2003 yang dituangkan dalam akta notaris



No.209 tanggal 13 juni 2003 notaris Yondri Darto,SH Notaris diBatam dan telah pula mendapat persetujuan deputi gubernur senior Bank Indonesia tanggal 22 juli 2003.

Sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 april 2010,elah dilakukan perubahan nama PT.BPD Bank Riau Kepri yang persetujuan menteri Hukum dan HAM RI melalui keputusan ditahun 2010 serta persetujuan dari bank Indonesia melalui surat keputusan bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 sepember 2010.perubahan nama ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 13 oktober 2010 dibatam

#### **4.2.8.1 Visi dan Misi BPD Riau dan Kepri**

##### **A.Visi**

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka didaerah,memiliki manajemen professional dan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

##### **B.Misi**

- 1.Sebagai Bank sehat,elit,dan merakyat.
- 2.Sebagai pendorong perekonomian daerah.
- 3.Sebagai pengelola dana pemerintah daerah.

4. Sebagai sumber pendapatan daerah.

5. Membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

#### **4.2.9 Sejarah BPD Kalimantan Selatan**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 maret 1954, berdasarkan peraturan tingkat daerah 1 Kalimantan Selatan No.4 tahun 1964 tentang ketentuan pokok Bank ketentuan daerah, dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000. operasional Bank berdasarkan izin usaha dari menteri urusan Bank Gubernur bank Indonesia sesuai surat keputusan No.26/UBs/65 tanggal 31 maret 1965. tujuan pendirian BPD Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

##### **4.2.9.1 Visi dan Misi BPD Kalsel**

###### **A. Visi**

Menjadi Bank yang kuat kompetitif dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional.

###### **B. Misi**

- 1.Membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi baik dikawasan regional maupun kawasan nasional.
- 2.Memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif berbasis digital.
- 3.menempati posisi strategis melalui program kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
- 4.Memberikan kontribusi positif kepada semua stakeholder baik pemegang saham,nasabah,karyawan,maupun masyarakat.

#### **4.3.1 Sejarah BPD Kalimantan Barat**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan barat didirikan berdasarkan peraturan daerah No.1 tahun 1963 dengan bentuk hukum perusahaan daerah.izin usaha dikeluarkan oleh menteri urusan bank sentral/Gubernur Bank Indonesia dengan surat keputusan No.44/63/KEP/MUBS/G tanggal 28 november 1963,peresmiannya dilakukan pada tanggal 15 april 1964.pada tahun 1999 berdasarkan perda No.1 tanggal 2 february 1999 terjadi perubahan status hukum BPD Kalbar dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas serta perubahan nama menjadi Pt.BPD Kalimantan Barat dengan call me Bank Kalbar melalui akta notaris Widiyansah SH.pada tanggal 30 juli 2004,Bank Kabar menyelesaikan rekapitulasi,disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah pusat oleh pemerintah provinsi,kabupaten dan kota se-kalimantan

barat.bulan desember 2005 Bank kalbar melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Bank kalbar cabang syariah Pontianak.

#### **4.3.1.1 Visi dan Misi BPD Kalbar**

##### **A.Visi**

Sebagai perusahaan jasa perbankan yang berkinerja tinggi dan berkembang secara wajar serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

##### **B.Misi**

- 1.Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2.Mengelola dana pemerintah daerah.
- 3.Mendorong pengembangan usaha terutama usaha mikro,kecil dan menengah.

#### **4.3.2 Sejarah BPD Kalimantan Timur**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan timur dan Kalimantan utara disingkat Pt.BPD kaltim kaltara dengan sebutan Bankaltimtara,merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Kalimantan utara,pemerintah kabupaten/kota Kalimantan timur dan pemerintah kabupaten kalimantan utara dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas.

Pada saat pertama kali didirikan pada tahun 1965, modal dasar Bank tercantum sebesar Rp 100.000.000 dimana untuk mendapatkan modal tersebut Bank menjual saham-saham kepada pemerintah maupun swasta. Pada akhir tahun 1970-an seluruh modal milik swasta/perorangan telah dibeli kembali oleh pemerintah daerah, sehingga saat ini seluruh modal disetor 100% adalah milik pemerintah daerah dengan modal dasar sebesar Rp 10.000.000.000.000.

Ditahun 2017 pada usia 52 tahun, merupakan momentum penting bagi reposisi kegiatan bisnis Bank yaitu dengan berubahnya bentuk badan hukum bank dari perusahaan daerah menjadi bank perseroan terbatas dan perubahan nama Bank dengan mengakomodir nama Kalimantan utara dalam identitas Bank sehingga bertransformasi menjadi Pt BPD daerah Kalimantan timur dan Kalimantan utara disingkat Pt. BPD Bankaltimtaru.

#### **4.3.2.1 Visi dan Misi BPD Kalimantan Timur**

##### **A. Visi**

Menjadi the true regional champion yang kuat, kompetitif dan kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

##### **B. Misi**

1. Mengembangkan bisnis dan layanan perbankan yang berorientasi solusi dan berbasis teknologi.
2. Menjadi pendukung utama program pembangunan ekonomi dan menopang pemberdayaan perekonomian rakyat.
3. Membudayakan filosofi kerja yang berorientasi pada prestasi.
4. Menjaga dan meningkatkan reputasi Bank.
5. Memperkuat ketahanan kelembagaan melalui pelaksanaan kepatuhan dan manajemen risiko yang berkualitas.
6. Mendorong penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan aktivitas dan bisnis Bank.
7. Meningkatkan kepedulian sosial bagi komunitas dan lingkungan sekitar.

#### **4.3.3 Sejarah BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat didirikan di makasar pada tanggal 13 januari 1961 dengan nama awal Pt Bank pembangunan daerah Sulawesi selatan tenggara sesuai dengan akta notaris raden kadiman dijakarta No.95 tanggal 23 januari 1961. Kemudian berdasarkan akta notaris raden kadiman No.67 tanggal 13 juli 1961 nama Pt BPD Sulawesi selatan tenggara diubah menjadi Bank pembangunan daerah Sulawesi selatan tenggara. berdasarkan peraturan daerah tingkat 1 sulawesi selatan tenggara No.002 tahun 1964 tanggal 12

februari 1964,nama BPD Sulawesi tenggara diubah menjadi BPD Sulawesi tenggara tingkat 1 dengan modal dasar Rp 250.000.000 dengan pemisahan antara provinsi daerah tingkat 1 sulawesi selatan dengan provinsi tingkat 1 sulawesi tenggara,maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank berganti menjadi BPD Sulawesi selatan.

#### **4.3.3.1 Visi dan Misi BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**

##### **A.Visi**

Menjadi Bank kebanggaan dan pilihan utama membangun kawasan timur indonesia

##### **B.Misi**

- 1.Memberikan pelayanan prima yang berkualitas dan terpercaya.
- 2.Mitra strategis pemda dalam menggerakan sistem rill.
- 3.Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder.

#### **4.3.4 Sejarah BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung**

Bank Pembangunan daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah didirikan dan mulai operasional pada tanggal 2 januari 2006,pada tanggal 10 desember 2014 sesuai dengan updating buku pedoman organisasi kantor pusat dengan nomor intruksi : 452/DIR/INS/2014 tanggal 10 desember

2014 indeks 3.017 Bab pendahuluan hal.Vii menyatakan bahwa terdapat pengembangan struktur organisasi bank sumsel babel, semula satuan yang disebut Unit Usaha Syariah berubah menjadi divisi usaha syariah yang merupakan kesungguhan komitmen direksi untuk mengembangkan operasional bisnis berbasis syariah agar dapat tumbuh dan berkembang secara terencana, fokus dan sesuai roadmap pengembangan bisnis syariah yang disarankan oleh pemegang saham dan regulator yang diharapkan dalam memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian daerah dan nasional dengan pencapaian optimalisasi yang akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan perkembangan Bank SumSel BaBel Syariah.

#### **4.3.4.1 Visi dan Misi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung**

##### **A. Visi**

Menjadi Bank terkemuka dan terpercaya dengan kinerja unggul.

##### **B. Misi**

1. Membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah
2. Menumbuhkembangkan retail banking, corporate banking, dan international banking.



3.Mengembangkan human capital yang professional dan tata kelola perusahaan yang baik.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil penelitian

##### 5.1.1 Analisis deskriptif variabel penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah membahas mengenai perolehan seluruh data (variabel) yang digunakan dalam penelitian yang terdiri data dari tahun 2019-2020.

Variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. variabel penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

##### 5.1.2 Return On Assets (ROA)

Return on assets (ROA) merupakan rasio utama yang digunakan dalam menganalisis profitabilitas perbankan karena return on assets (ROA) digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam mengelola seluruh asset bank untuk menciptakan pendapatan berupa laba yang dihitung berdasarkan perbandingan laba bersih dengan rata rata asset total. adapun tabel kesimpulan dari hasil perhitungan analisis rasio kinerja keuangan unit usaha syariah periode tahun 2017-2018 sebelum covid19 dan periode pada masa covid19 tahun 2019-2020.

**Tabel 5.1**

Perhitungan return on assets (ROA) sebelum covid-19 (2017-2018) dan masa covid-19 (2019-2020)

No	Nama bank	Return On Asset (ROA)			
		2017	2018	2019	2020
1	Bank Cimb Niaga	1,70	1,85	1,99	1,06
2	Bank Permata	0,6	0,8	1,30	1,00
3	Bank Maybank	1,48	1,74	1,45	1,04
4	Bank OCBC Nisp	1,96	2,10	2,22	1,47
5	Bank sinarmas	2,07	1,35	1,55	1,46
6	Bank BTN	1,70	1,85	0,33	0,69
7	Bank Danamon	3,1	3,1	2,1	0,5
8	BPD DKI	2,04	2,24	2,31	1,56
9	BPD DIY	2,88	2,84	5,38	4,62
10	BPD Jawa Tengah	2,69	2,66	1,88	2,03
11	BPD Jawa Timur	2,72	3,56	0,18	0,29
12	BPD Sumatera Utara	2,65	2,09	2,21	1,89
13	BPD Sumatera Barat	1,86	2,03	2,06	1,78
14	BPD Jambi	3,65	2,06	2,93	8,2
15	BPD Riau kepri	2,30	1,97	1,56	2,93

No	Nama bank	Return On Asset (ROA)			
		2017	2018	2019	2020
16	BPD Kalimantan Selatan	1,73	1,31	1,42	1,83
17	BPD Kalimantan Barat	2,94	2,71	2,73	2,90
18	BPD Kalimantan Timur	2,72	2,4	1,18	2,06
19	BPD Sulsel/Sulbar	3,56	3,67	1,91	1,16
20	BPD Sumsel/Babel	1,83	2,63	2,87	2,15
	Rata-rata	<b>2,22%</b>	<b>2,24%</b>	<b>1,97%</b>	<b>2,03</b>

Sumber : Data olahan tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel 5.1 diatas,dapat dilihat nilai return on assets (ROA) dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebelum covid-19 mengalami peningkatan pada unit usaha syariah dilihat dari tabel hasil rata-rata.pada periode 2018 yaitu BPD Sulsel/Sulbar memiliki return on assets (ROA) tertinggi sebesar 3,67 % hal ini mengindikasikan bahwa BPD Sulsel/Sulbar secara efektif menggunakan aktivityanya untuk mendapatkan laba yang maksimal.Hal ini mengindikasikan bahwa BPD Sulsel/Sulbar mampu meningkatkan laba yang di inginkan.

Sedangkan pada tahun 2017 return on assets dikatakan kategori terendah Bank Permata dengan perolehan nilai 0.6 %.hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan sangat kecil untuk memperoleh profit setiap tahunnya dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan kurang mampu menggunakan asset yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan laba yang di inginkan.

Berdasarkan tabel 5.1 diatas,dapat dilihat nilai return on assets (ROA) dari tahun 2019 ke tahun 2020 masa covid-19 mengalami peningkatan pada unit usaha syariah dilihat dari hasil rata-rata.pada periode 2019 yaitu Bank DIY memiliki return on assets (ROA) tertinggi sebesar 5,38 % hal ini mengindikasikan bahwa Bank DIY secara efektif menggunakan aktivityanya untuk mendapatkan laba yang maksimal.Hal ini mengindikasikan bahwa Bank DIY mampu meningkatkan laba yang di inginkan.

Sedangkan pada tahun 2019 return on assets dikatakan kategori terendah Bank Jawa timur dengan perolehan nilai 0.18 % .hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan sangat kecil untuk memperoleh profit setiap tahunnya dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan kurang mampu menggunakan asset yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan laba yang di inginkan.

### **5.1.3 Financing to Deposit Ratio (FDR).**

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu Bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya,yaitu dengan membagi jumlah.adapun tabel hasil perhitungan rasio dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2**

**Perhitungan Financing to Deposit Ratio (FDR) Masa Covid-19 (2017-2018) dan  
Masa Pandemi Covid-19 (2019-2020)**

No	Nama Bank	Financing to Deposit Ratio (FDR)			
		2017	2018	2019	2020
1	Bank Cimb Niaga	97,88	83,48	1,06	50,05
2	Bank Permata	87,43	94,8	89,16	77,82
3	Bank Maybank	119,6	85,97	91,80	95,59
4	Bank OCBC Nisp	83,88	77,07	90,12	69,79
5	Bank Sinarmas	129,68	135,65	131,11	119,21
6	Bank BTN	98,54	101,91	102,73	110,43
7	Ban Danamon	103,92	83,28	110,92	131,71
8	BPD DKI	110,67	120,36	251,89	212,82
9	BPD DIY	78,67	120,15	133,94	134,85
10	BPD Jawa Tengah	78,67	120,20	131,43	104,43
11	BPD Jawa Timur	114,33	105,01	80,25	95,73
12	BPD Sumatera Utara	126,16	125,42	114,85	110,86
13	BPD Sumatera Barat	182,41	180,04	111,22	86,94
14	BPD Jambi	70,90	67,50	126,30	116,62
15	BPD Riaukepri	112,02	120,10	100,15	91,73

No	Nama Bank	Financing to Deposit Ratio (FDR)			
		2017	2018	2019	2020
16	BPD Kalsel	155,36	167,78	86	78,6
17	BPD Kalbar	86,86	72,53	184,27	186,32
18	BPD Kaltim	97,96	95,92	54,13	92,99
19	BPD Sulsel/Sulbar	119,77	95,36	120,19	113,79
20	BPD Sumsel/Babel	62,59	80,17	66,29	80,87
	<b>Rata-rata</b>	<b>105,86%</b>	<b>106,63%</b>	<b>108,89%</b>	<b>107,95%</b>

Sumber: Data Olahan 2017-2020

Berdasarkan tabel 5.2 diatas,dapat dilihat nilai Financing to Deposit Ratio(FDR) dari tahun 2017-2018 sebelum covid-19 terjadinya peningkatan dapat dilihat dari tabel diatas dari hasil rata-rata tahun.pada periode tahun 2017 pada BPD Suamtera Barat memiliki financing to deposit ratio(FDR) tertinggi sebesar 182,41%.hal ini mengindikasikan bahwa BPD Jambi mampu meningkatkan kegiatan usaha bank.

Perusahaan dengan Financing to Deposit Ratio(FDR) terendah pada BPD Sumsel/Babel dengan nilai 62,59%.hal ini bahwa mengindikasikan perusahaan kurang memperoleh profit ditahun 2017 pada tahun tersebut perusahaan sangat sulit dalam financing to deposit ratio (FDR) dan juga sulit mendapatkan laba yang di inginkan.

Berdasarkan tabel 5.2 diatas,dapat dilihat nilai Financing to Deposit Ratio(FDR) masa pandemic dari tahun 2019-2020 terjadinya penurunan dapat dilihat dari tabel diatas dari hasil rata-rata tahun.pada periode tahun 2019 pada BPD DKI memiliki financing to deposit ratio(FDR) tertinggi sebesar 251.89%.hal ini mengindikasikan bahwa BPD DIY mampu meningkatkan kegiatan usaha bank.

Perusahaan dengan Financing to Deposit Ratio(FDR) terendah pada Bank Cimb Niaga dengan nilai 1.06%.hal ini bahwa mengindikasikan perusahaan sangat kecil untuk memperoleh profit ditahun 2019 pada tahun tersebut perusahaan sangat sulit dalam financing to deposit ratio (FDR) dan juga sulit mendapatkan laba yang diinginkan.

#### **5.1.4 Non Performing Financing (NPF)**

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan,dimana NPF rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar,diragukan,dan macet)dengan total pembiayaan yang disalurkan.adapun tabel hasil perhitungan rasio dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 5.3**

**Perhitungan Non Performing Financing (NPF) sebelum pandemic covid-19(2017-2018) dan masa pandemic covid-19 (2019-2020)**

No	Nama Bank	Non Performing Financing(NPF)			
		2017	2018	2019	2020
1	Bank Cimb Niaga	0,36	0,42	0,00	0,60
2	Bank Permata	1,1	0,92	0,78	1,60
3	Bank Maybank	2,79	2,21	1,70	2,18
4	Bank OCBC Nisp	1,59	1,34	1,16	1,11
5	Bank Sinarmas	4,25	5,58	2,70	2,00
6	Bank BTN	0,64	1,47	3,85	4,88
7	Bank Danamon	0,53	0,92	7,55	1,52
8	BPD DKI	0,44	0,31	0,84	1,18
9	BPD DIY	0,09	0,06	0,16	0,12
10	BPD Jawa tengah	0,09	0,06	0,22	0,62
11	BPD Jawa timur	9,20	9,65	0,75	1,43
12	BPD Sumatera Utara	2,32	2,33	10,81	14,04
13	BPD Sumatera Barat	0,00	0,02	0,92	1,08
14	BPD Jambi	0,24	0,18	0,06	0,05
15	BPD Riaukepri	6,45	4,84	0,07	0,29

No	Nama Bank	Non Performing Financing(NPF)			
		2017	2018	2019	2020
16	BPD Kalsel	0,22	0,11	4,57	1,08
17	BPD Kalbar	2,57	3,12	0,11	0,06
18	BPD Kaltim	0,51	1,64	2,01	2,10
19	BPD Sulsel/Sulbar	0,34	0,67	3,55	0,52
20	BPD Sumsel/Babel	2,34	1,20	1,03	1,84
	<b>Rata-rata</b>	<b>1,67%</b>	<b>1,85%</b>	<b>2,14 %</b>	<b>1,96%</b>

Sumber : Olahan Data 2017-2020

Berdasarkan tabel 5.3 diatas,dapat dilihat nilai Non performing financing (NPF) sebelum pandemic covid-19 pada 20 Bank unit usaha syariah terjadi penurunan dilihat dari tabel rata-rata dari tahun 2017-2018 .pada periode tahun pada Bank Jawa Timur memiliki Non performing financing (NPF) tertinggi sebesar 9.20%.hal ini mengindikasikan bahwa BPD Sumatera Utara secara efektif menggunakan aktivasnya untuk mendapatkan laba yang maksimal.

Perusahaan dengan Non Performing Financing (NPF) terendah pada periode tahun 2017 diperoleh oleh BPD Suamtera Barat dengan nilai 0.00%.hal ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan sangat kecil untuk memperoleh profit setiap tahunnya dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu menggunakan asset yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan laba yang di inginkan.

Berdasarkan tabel 5.3 diatas,dapat dilihat nilai Non performing financing (NPF) dari tahun 2019 -2020 pada 20 Bank unit usaha syariah terjadi penurunan dilihat dari tabel rata-rata dari tahun 2019-2020 .pada periode tahun 2020 pada Bank Sumatera Utara memiliki Non performing financing (NPF) tertinggi sebesar 14.04%.hal ini mengindikasikan bahwa BPD Sumatera Utara secara efektif menggunakan aktivityanya untuk mendapatkan laba yang maksimal.

Perusahaan dengan Non Performing Financing (NPF) terendah pada periode tahun 2019 diperoleh oleh Bank Cimb Niaga dengan nilai 0.00%.hal ini mengidentifikasi bahwa perusahaan sangat kecil untuk memperoleh profit setiap tahunnya dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu menggunakan asset yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan laba yang di inginkan.

#### **5.1.5 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)**

Rasio antara total beban operasional dan total pendapatan operasional,yang mana rasio tersebut diperhitungkan perposisi.rasio yang dapat memberikan penilaian atas efisiensi perbankan.hasil dari penelitian dapa dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4**

**Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional(BOPO) sebelum pandemi covid-19 (2017-2018) dan masa pandemi covid-19 (2019-2020)**

No	Nama Bank	BOPO			
		2017	2018	2019	2020
1	Bank Cimb Niaga	83,48	80,97	82,44	89,38
2	Bank Permata	94,8	93,4	85,70	88,80
3	Bank Maybank	85,97	83,47	85,78	87,83
4	Bank OCB Nisp	77,07	74,43	74,77	81,13
5	Bank Sinarmas	88,94	97,62	119,43	111,70
6	Bank BTN	83,44	80,97	91,61	98,12
7	Bank Danamon	72,1	70,9	84,5	88,9
8	BPD DKI	76,97	75,17	76,01	81,99
9	BPD DIY	70,12	73,35	47,31	52,41
10	BPD Jateng	74,60	73,87	80,65	79,44
11	BPD Jatim	68,63	69,45	71,40	77,76
12	BPD Sumut	77,85	82,37	80,38	80,38
13	BPD Sumbar	83,39	82,33	82,66	85,08
14	BPD Jambi	66,48	75,84	78,41	75,03
15	BPD RiauKepri	78,10	79,58	83,45	70,41

No	Nama Bank	BOPO			
		2017	2018	2019	2020
16	BPD KalSel	83,54	87,82	88,79	80,71
17	BPD Kalbar	71,84	72,63	71,85	69,95
18	BPD Kaltim	78,70	71,91	88,54	89,69
19	BPD Sulsel dan Sulbar	70,28	67,61	73,40	69,71
20	BPD Sumsel Dan Babel	80,17	86,53	54,30	71,41
	<b>Rata-rata</b>	<b>78,32%</b>	<b>74,89%</b>	<b>80,06 %</b>	<b>81,49%</b>

Sumber data : data olahan 2017-2020

Berdasarkan tabel 5.4 di atas, dapat dilihat nilai Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dari tahun 2017-2018 terjadinya penurunan dilihat dari tabel rata-rata. Pada periode tahun 2019 Bank Sinarmas memiliki Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tertinggi sebesar 97,62%. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Sinarmas mampu memperhitungkan profitabilitas setiap posisinya.

Perusahaan dengan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terendah pada periode pada tahun 2019 diperoleh oleh BPD Jambi dengan nilai 66,48%. Hal ini menindikasikan bahwa perusahaan kurang memperhitungkan profitabilitas setiap penilaian atas efisiensi perbankan.

Berdasarkan tabel 5.4 di atas,dapat dilihat nilai Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dari tahun 2019-2020 terjadinya peningkatan dilihat dari tabel rata-rata.pada periode tahun 2019 Bank Sinarmas memiliki Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional(BOPO) tertinggi sebesar 119.43%.Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Sinarmas mampu memperhitungkan profitabilitas setiap posisinya.

Perusahaan dengan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional(BOPO) terendah pada periode pada tahun 2019 diperoleh oleh Bank DIY dengan nilai 47.31%.hal ini menindikasikan bahwa perusahaan kurang memperhitungkan profitabilitas setiap penilaian atas efisiensi perbankan.

Adapun tabel hasil kesimpulan dari hasil perhitungan analisis kinerja keuangan unit usaha syariah periode 2019-2020 adalah sebagai berikut :

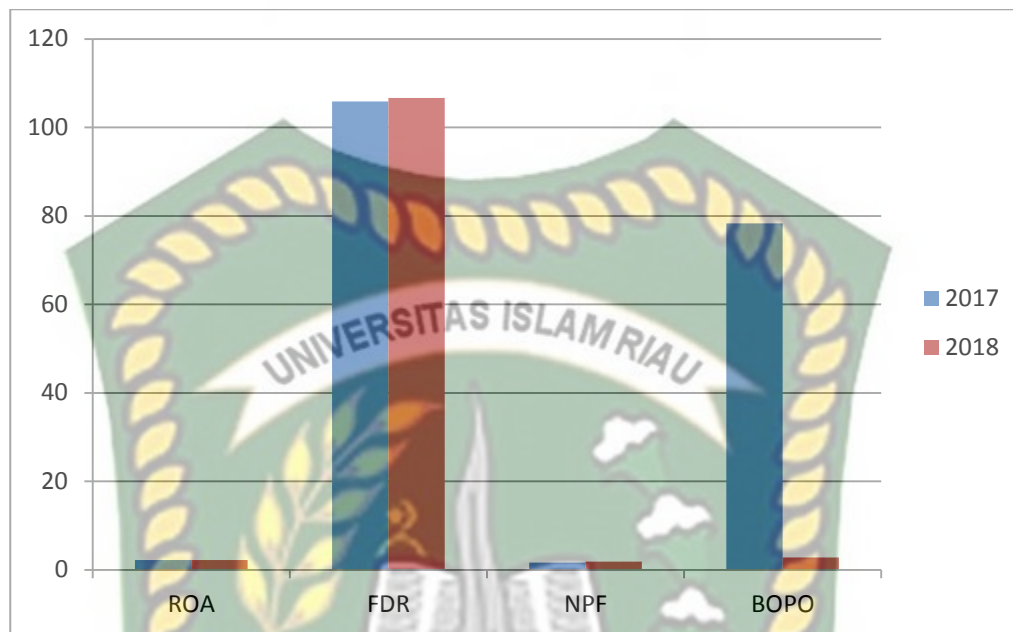


**Tabel 5.5**

**Hasil perhitungan analisis kinerja unit usaha syariah sebelum covid19  
2017-2018**

Nama Bank	ROA		FDR		NPF		BOPO	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Bank Cimb Niaga	1,70	1,85	97,88	83,48	0,36	0,42	83,48	80,97
Bank Permata	0,6	0,8	87,43	94,8	1,1	0,92	94,8	93,4
Bank Maybank	1,48	1,74	119,6	85,97	2,79	2,21	85,97	83,47
Bank OCBC Nisp	1,96	2,10	83,88	77,07	1,59	1,34	77,07	74,43
Bank Sinarmas	2,07	1,35	129,68	135,65	4,25	5,58	88,94	97,62
Bank BTN	1,70	1,85	98,54	101,91	0,64	1,47	83,44	80,97
Bank Danamon	3,1	3,1	103,92	83,28	0,53	0,92	72,1	70,9
BPD DKI	2,04	2,24	110,67	120,36	0,44	0,31	76,97	75,17
BPD DIY	2,88	2,84	78,67	120,15	0,09	0,06	70,12	73,35
BPD Jateng	2,69	2,66	78,67	120,20	0,09	0,06	74,60	7387
BPD Jatim	2,72	3,56	114,33	105,01	9,20	9,65	68,63	69,45
BPD Sumut	2,65	2,09	126,16	125,42	2,32	2,33	77,85	82,37
BPD Sumbar	1,86	2,03	182,41	180,04	0,00	0,02	83,39	82,33
BPD jambi	3,65	2,06	70,90	67,50	0,24	0,18	66,48	75,84
BPD RiauKepri	2,30	1,97	112,02	120,10	6,45	4,84	78,10	79,58
BPD Kalsel	1,73	1,31	155,36	167,78	0,22	0,11	83,54	87,82
BPD Kalbar	2,94	2,71	86,86	72,53	2,57	3,12	71,84	72,63
BPD Kaltim	2,72	2,4	97,96	95,92	0,51	1,64	78,70	71,91
BPD Sulsulbar	3,56	3,67	119,77	95,36	0,34	0,67	70,28	67,61
BPDSumselBabel	1,83	2,63	62,59	80,17	2,34	1,20	80,17	86,53
Rata-rata	<b>2.22</b>	<b>2.24</b>	<b>105.86</b>	<b>106.63</b>	<b>1.67</b>	<b>1.85%</b>	<b>78.32</b>	<b>74.89</b>
	%	%	%	%	%		%	%

Diagram Batang Unit Usaha Syariah Tahun 2017-2018



Berdasarkan dari data tabel diatas dan diagram batang terlihat bahwa hasil perhitungan rata persentase tahun 2017 dari analisis rasio keuangan unit usaha syariah,dengan nilai ROA 2.22% ,FDR 105.86% ,NPF 1.67% ,BOPO 78.32% .kondisi unit usaha syariah pada tahun 2017 sangat baik.

Sedangkan data tabel hasil perhitungan rata-rata persentase ditahun 2018 dari analisis rasio keuangan unit usaha syariah, dengan nilai ROA 2,24%, FDR 106.63%, NPF 1.85%, BOPO 74.89%. Kondisi unit usaha syariah pada tahun 2020 mengalami kenaikan lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu 2017.



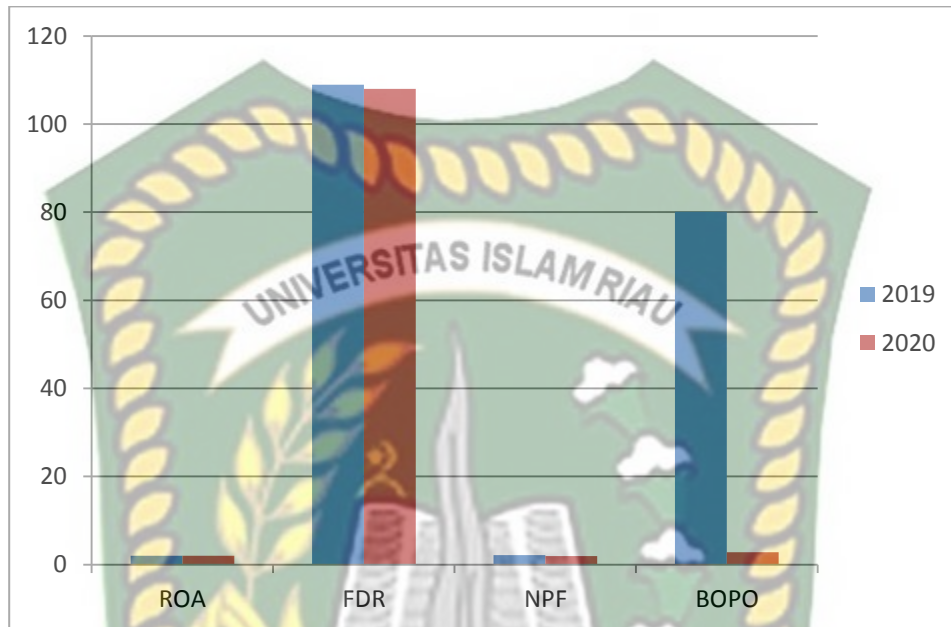
Tabel 5.6

Hasil perhitungan analisis kinerja unit usaha syariah masa covid19

2019-2020

Nama Bank	ROA		FDR		NPF		BOPO	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Bank Cimb Niaga	1,99	1,06	1,06	50,05	0,00	0,60	82,44	89,38
Bank Permata	1,30	1,00	89,16	77,82	0,78	1,60	85,70	88,80
Bank Maybank	1,45	1,04	91,80	95,59	1,70	2,18	85,78	87,83
Bank OCBC Nisp	2,22	1,47	90,12	69,79	1,16	1,11	74,77	81,13
Bank Sinarmas	1,55	1,46	131,11	119,21	2,70	2,00	119,43	111,70
Bank BTN	0,33	0,69	102,73	110,43	3,85	4,88	91,61	98,12
Bank Danamon	2,1	0,5	110,92	131,71	7,55	1,52	84,5	88,9
BPD DKI	2,31	1,56	251,89	212,82	0,84	1,18	76,01	81,99
BPD DIY	5,38	4,62	133,94	134,85	0,16	0,12	47,31	52,41
BPD Jateng	1,88	2,03	131,43	104,43	0,22	0,62	80,65	79,44
BPD Jatim	0,18	0,29	80,25	95,73	0,75	1,43	71,40	77,76
BPD Sumut	2,21	1,89	114,85	110,86	10,8	14,04	80,38	80,38
BPD Sumbar	2,06	1,78	111,22	86,94	0,92	1,08	82,66	85,08
BPD jambi	2,93	8,2	126,30	116,62	0,06	0,05	78,41	75,03
BPD RiauKepri	1,56	2,93	100,15	91,73	0,07	0,29	83,45	70,41
BPD Kalsel	1,42	1,83	86	78,6	4,57	1,08	88,79	80,71
BPD Kalbar	2,73	2,90	184,27	186,32	0,11	0,06	71,85	69,95
BPD Kaltim	1,18	2,06	54,13	92,99	2,01	2,10	88,54	89,69
BPD Sulsulbar	1,91	1,16	120,19	113,79	3,55	0,52	73,40	69,71
BPDSumselBabel	2,87	2,15	66,29	80,87	1,03	1,84	54,30	71,41
<b>Rata-rata</b>	<b>1.97</b>	<b>2.03</b>	<b>108.89</b>	<b>107.95</b>	<b>2.14</b>	<b>1.96%</b>	<b>80.06</b>	<b>81.49</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>		<b>%</b>	<b>%</b>

Diagram Batang Unit Usaha Syariah Tahun 2019-2020



Berdasarkan dari data tabel dan diagram batang diatas terlihat bahwa hasil perhitungan rata persentase tahun 2019 dari analisis rasio keuangan unit usaha syariah,dengan nilai ROA 1.97% ,FDR 108,89% ,NPF 2,14% ,BOPO 20,06% .kondisi unit usaha syariah pada tahun 2019 sangat baik.

Sedangkan data tabel hasil perhitungan rata-rata persentase ditahun 2020 dari analisis rasio keuangan unit usaha syariah, dengan nilai ROA 2,03%, FDR 107,95%, NPF 1.96%, BOPO 81.49%. Kondisi unit usaha syariah pada tahun 2020 mengalami kenaikan lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu 2019.

## 5.2 Analisis Perbandingan kinerja keuangan

Selanjutnya analisis kinerja keuangan dijelaskan dari hasil peneitian yang melakukan pengamatan terhadap unit usaha syariah periode 2017-2018 sebelum covid-19 dan 2019-2020 pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan alat

penguji “statistik independent sample t-test”, dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut :

Ho : tidak terjadi signifikan antara kinerja keuangan unit usaha syariah.

H1 : terjadi signifikan antara kinerja keuangan unit usaha syariah.

-Jika nilai sig.2-tailed  $>0,05$  maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak terjadi signifikan pada unit usaha syariah.

-jika nilai sig.2-tailed  $<0,05$  maka ho ditolak dan Ha diterima, artinya terjadinya signifikan pada kinerja unit usaha syariah.

Pengambilan keputusan dengan perbandingan nilai T-hitung dengan T-tabel sebagai berikut :

a. jika T-hitung  $<$  T-tabel maka Ho diterima sedangkan Ha ditolak, artinya tidak terjadi signifikan pada unit usaha syariah.

b. jika T-hitung  $>$  T-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terjadi signifikan antara kinerja unit usaha syariah.

### **5.2.1 Return on Asset**

Adapun hasil kinerja keuangan pada Return on asset unit usaha syariah pada tahun 2017-2018 sebelum pandemi covid-19 dan masa pandemi covid-19 tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.7**

***Hasil Uji Statistic Independent Sample t-Test Return on Asset tahun 2017-2018 sebelum pandemi dan masa pandemi 2019-2020***

ROA	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means Interval = 95%		
	F	Sig.	T	Sig.(2-Tailed)	Mean Difference
Equal variances assumed	0.415	0.523	1.294	0.205	0.38325
Equal variances not assumed			1.294	0.205	0.38325

*“Sumber Data: SPSS yang telah diolah, 2021”*

Berdasarkan tabel output 5.11 *“Hasil Uji Statistic Independent Sample t-Test Return on Asset tahun 2017-2018 dan 2019-2020”* pada bagian *“Equal variance assumed”*, terlihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar  $0,205 > 0,05$ , maka dapat diambil sebuah keputusan dan ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan pengujian Independent Sample T-Test bahwasannya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, ini berarti tidak terjadi signifikan antara kinerja keuangan unit usaha syariah di tahun 2017-2018 dan 2019-2020.

Pengambilan keputusan dengan perbandingan nilai T-hitung dengan T – tabel sebagai berikut:

- a. Jika  $T\text{-hitung} < T\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima sedangkan  $H_a$  di tolak, artinya tidak terjadi signifikan pada unit usaha syariah.
- b. Jika  $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terjadi signifikan antara kinerja unit usaha syariah.

c. T-hitung untuk ROA adalah 1,294, Sedangkan nilai T-tabel adalah 2,021, perbandingan antara T-hitung dan T-tabel adalah  $1,294 < 2,021$ , maka berdasarkan pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima sedangkan  $H_a$  di tolak, artinya tidak terjadi signifikan pada unit usaha syariah di tahun 2017-2018 sebelum pandemi covid-19 dan sesudah pandemi covid-19 2019-2020.

### 5.2.2 Financing to Deposit Ratio

Adapun hasil kinerja keuangan pada Financing to Deposit Ratio unit usaha syariah tahun 2017-2018 sebelum pandemi covid-19 dan masa pandemi covid-19 tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.8**

***Hasil Uji Statistic Independent Sample t-Test Financing to Deposit Ratio tahun 2017-2018 sebelum pandemi dan masa pandemi 2019-2020***

FDR	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means Interval = 95%		
	F	Sig.	T	Sig.(2-Tailed)	Mean Difference
Equal variances assumed	1,275	0,266	0,068	0,946	-0,77675
Equal variances not assumed			0,068	0,946	-0,77675

*“Sumber Data: SPSS yang telah diolah, 2021”*

Berdasarkan tabel output 5.12 “*Hasil Uji Statistic Independent Sample t-Test Financing to Deposit Ratio*” pada bagian “Equal variance assumed”, terlihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar  $0,946 > 0,05$ , maka dapat diambil sebuah keputusan dan ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan pengujian Independent Sample T-Test

bahwasannya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, ini berarti tidak terjadi signifikan antara kinerja keuangan unit usaha syariah di tahun 2017-2018 dan 2019-2020.

Pengambilan keputusan dengan perbandingan nilai T-hitung dengan T – tabel sebagai berikut:

- d. Jika  $T\text{-hitung} < T\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima sedangkan  $H_a$  di tolak, artinya tidak terjadi signifikan pada unit usaha syariah.
- e. Jika  $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terjadi signifikan antara kinerja unit usaha syariah.

T-hitung untuk FDR adalah 0,068, Sedangkan nilai T-tabel adalah 2,021, perbandingan antara T-hitung dan T-tabel adalah  $0,068 < 2,021$ , maka berdasarkan pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima sedangkan  $H_a$  di tolak, artinya tidak terjadi signifikan pada unit usaha syariah pada tahun 2017-2018 sebelum pandemi covid-19 dan masa pandemi covid-19 2019-2020.

### **5.2.3. Non Performing Financing**

Adapun hasil kinerja keuangan pada Non Performing Financing unit usaha syariah tahun 2017-2018 sebelum pandemi covid-19 dan masa pandemi covid-19 2019-2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.9**

***Hasil Uji Statistic Independent Sample t-Test Non Performing Financing tahun 2017-2018 sebelum pandemi dan masa pandemi 2019-2020***

NPF	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means Interval = 95%		
	F	Sig.	T	Sig.(2-Tailed)	Mean Difference
Equal variances assumed	0,02	0,963	-0,240	0,812	-0,19537
Equal variances not assumed			-0,240	0,812	-0,19537

*“Sumber Data: SPSS yang telah diolah, 2021”*

Berdasarkan tabel output 5.13 *“Hasil Uji Statistic Independent Sample t-Test Non Performing Financing tahun 2017-2018 dan 2019-2020”* pada bagian *“Equal varience assumed”*, terlihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar  $0,812 > 0,05$ , maka dapat diambil sebuah keputusan dan ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan pengujian Independent Sample T-Test bahwasannya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, ini berarti tidak terjadi signifikan antara kinerja keuangan unit usaha syariah di tahun 2017-2018 dan 2019-2020.

Pengambilan keputusan dengan perbandingan nilai T-hitung dengan T – tabel sebagai berikut:

- f. Jika  $T\text{-hitung} < T\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima sedangkan  $H_a$  di tolak, artinya tidak terjadi signifikan pada unit usaha syariah.
- g. Jika  $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terjadi signifikan antara kinerja unit usaha syariah.

- h. T-hitung untuk NPF adalah -0,240, Sedangkan nilai T-tabel adalah 2,021, perbandingan antara T-hitung dan T-tabel adalah  $-0,240 < 2,021$ , maka berdasarkan pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima sedangkan  $H_a$  di tolak, artinya tidak terjadi signifikan pada unit usaha syariah.

#### 5.2.4 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional

Adapun hasil kinerja keuangan pada Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional unit usaha syariah tahun 2017-2018 dan 2019-2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.10**

***Hasil Uji Statistic Independent Sample t-Test Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional tahun 2017-2018 sebelum pandemi dan masa pandemi 2019-2020***

BOPO	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means Interval = 95%		
	F	Sig.	T	Sig.(2-Tailed)	Mean Difference
Equal variances assumed	1,438	0,238	-0,634	0,531	-2,11200
Equal variances not assumed			-0,634	0,531	-2,11200

*“Sumber Data: SPSS yang telah diolah, 2021”*

Berdasarkan tabel output 5.14 *“Hasil Uji Statistic Independent Sample t-Test Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional tahun 2017-2018 dan 2019-2020”* pada bagian *“Equal varience assumed”*, terlihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar  $0,531 > 0,05$ , maka dapat diambil sebuah keputusan dan ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan pengujian Independent Sample T-Test bahwasannya  $H_0$  diterima dan  $H_a$



ditolak, ini berarti tidak terjadi signifikan antara kinerja keuangan unit usaha syariah di tahun 2017-2018 dan 2019-2020.

Pengambilan keputusan dengan perbandingan nilai T-hitung dengan T – tabel sebagai berikut:

- i. Jika  $T\text{-hitung} < T\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima sedangkan  $H_a$  di tolak, artinya tidak terjadi signifikan pada unit usaha syariah.
- j. Jika  $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terjadi signifikan antara kinerja unit usaha syariah.
- k. T-hitung untuk BOPO adalah -0,634, Sedangkan nilai T-tabel adalah 2,021, perbandingan antara T-hitung dan T-tabel adalah  $-0,634 < 2,021$ , maka berdasarkan pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima sedangkan  $H_a$  di tolak, artinya tidak terjadi signifikan pada unit usaha syariah.

**Kesimpulan Dari Perbandingan Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah**

Rasio	Nilai Sig.2-Tailed tahun 2017-2018	Kesimpulan	Nilai Sig.2-Tailed tahun 2019-2020	Kesimpulan	Nilai Sig.2-Tailed tahun 2017-2018 dan 2019-2020	Kesimpulan
ROA	0,963 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan yang	0,633 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan yang	0,205 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan yang

Rasio	Nilai Sig.2-Tailed tahun 2017-2018	Kesimpulan	Nilai Sig.2-Tailed tahun 2019-2020	Kesimpulan	Nilai Sig.2-Tailed tahun 2017-2018 dan 2019-2020	Kesimpulan
		signifikan kinerja unit usaha Syariah di tahun 2017 dengan 2018		signifikan kinerja unit usaha Syariah di tahun 2019 dengan 2020		signifikan kinerja unit usaha Syariah di tahun 2017-2018 dan 2019-2020
FDR	0,696 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja unit usaha Syariah di tahun 2017 dengan 2018	0,953 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja unit usaha Syariah di tahun 2019 dengan 2020	0,946 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja unit usaha Syariah di tahun 2017-2018 dan 2019-2020
NPF	0,949 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja unit usaha	0,806 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja unit usaha	0,812 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja unit usaha

Rasio	Nilai Sig.2-Tailed tahun 2017-2018	Kesimpulan	Nilai Sig.2-Tailed tahun 2019-2020	Kesimpulan	Nilai Sig.2-Tailed tahun 2017-2018 dan 2019-2020	Kesimpulan
		Syariah di tahun 2017 dengan 2018		Syariah di tahun 2019 dengan 2020		Syariah di tahun 2017-2018 dan 2019-2020
BOPO	0,779 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja unit usaha Syariah di tahun 2017 dengan 2018	0,738 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja unit usaha Syariah di tahun 2019 dengan 2020	0,531 > 0,05	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja unit usaha Syariah di tahun 2017-2018 dan 2019-2020

“Sumber Data yang telah diolah, 2021”

### 5.3 Pembahasan

Perbandingan kinerja unit usaha Syariah di tahun 2017-2018 dan 2019-2020 di tinjau dari:

#### 1. Perbedaan Return on Asset di Tahun 2017-2018 dan 2019-2020

ROA dapat digunakan mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. fungsinya adalah untuk

melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba.

Berdasarkan pengujian T-test, dapat disimpulkan bahwa pada variabel ROA tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara di tahun 2017-2018, dan 2019-2020. Hal ini dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, ROA pada unit usaha syariah tidak terdapat pengaruh yang signifikan di tahun 2017-2018, dan 2019-2020. ROA masih stabil meskipun nilainya tergolong rendah.

## **2.Perbedaan Financing to Deposit Ratio di Tahun 2017-2018 dan 2019-2020**

FDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank. Apabila hasil pengukuran jauh berada diatas target dan limitnya,berarti tertutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pendapatan bank.semakin tinggi FDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pinjaman dengan efektif, sehingga jumlah pinjaman macetnya akan kecil).

Dari pengujian T-test, dapat dilihat bahwa pada variabel FDR tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara di tahun 2017-2018 dan 2019-2020. Hal ini dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, Financing to Deposit Ratio (FDR) pada unit usaha syariah tidak terdapat pengaruh yang signifikan di tahun 2017-

2018 dan 2019-2020. Hal ini terlihat dari persentase FDR yang masih dalam kategori standar menurut ketentuan Bank Indonesia meskipun berada pada masa pandemi.

### **3.Perbedaan Non Performing Financing di Tahun 2017-2018 dan 2019-2020**

Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan.

Dari pengujian T-test, dapat dilihat bahwa pada variabel NPF tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara di tahun 2017-2018 dan 2019-2020. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing (NPF) pada unit usaha syariah selama masa pandemi Covid-19 tidak terdapat pengaruh yang signifikan di tahun 2017-2018 dan 2019-2020. Bahkan masih tergolong baik karena masih dibawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni sebesar 5%.

### **4.Perbedaan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional di Tahun 2017-2018 dan 2019-2020**

Semua kegiatan operasional pastinya membutuhkan biaya, tanpa adanya biaya tidak mungkin kegiatan tersebut bisa dijalankan. Biaya operasional akan berhubungan dengan pendapatan operasional. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan hal saling berkaitan dimana jika pendapatan lebih besar dari biaya operasional, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika

perusahaan tidak bisa mengendalikan biaya operasionalnya hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan. Dalam perbankan pun juga demikian, BOPO juga berpengaruh besar dalam mengukur tingkat efisiensi dan juga kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk itu bank harus melakukan perbandingan antara jumlah biaya operasional dan juga pendapatan operasional yang diperolehnya.

Dari pengujian T-test, dapat dilihat bahwa pada variabel BOPO tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara di tahun 2017-2018 dan 2019-2020. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) pada unit usaha syariah selama masa pandemi Covid-19 tidak terdapat pengaruh yang signifikan di tahun 2017-2018 dan 2019-2020. Namun tingginya persentase BOPO di tahun 2019 dan 2020 menunjukkan perlu adanya penyesuaian yang lebih baik untuk menjaga sistem yang telah dibangun di dalam unit usaha syariah tersebut.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai rata-rata Return on Asset (ROA) pada 20 unit usaha syariah hasil dari t-test yang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pengaruh yang signifikan dari rasio ROA di 20 unit usaha di masa pandemi Covid-19. Namun hasil ini belum menunjukkan performa ROA yang baik karena nilai presentasi yang masih rendah. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba.
- b. Nilai rata-rata perhitungan Financing to Deposit Ratio (FDR) hasil dari t-test yang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pengaruh yang signifikan dari rasio FDR di 20 unit usaha di masa pandemi Covid-19. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah 80% hingga 110%. Sehingga, persentase FDR di tahun 2017-2018 dan 2019-2020 masih dalam kategori standar menurut ketentuan Bank Indonesia meskipun berada pada masa pandemi.
- c. Nilai rata-rata Non Performing Financing (NPF) hasil T-test bahwa Non Performing Financing (NPF) pada unit usaha syariah selama masa pandemi

Covid-19 tidak terdapat pengaruh yang signifikan di tahun 2017-2018 dan 2019-2020. Bahkan masih tergolong baik karena masih dibawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni sebesar 5%.

- d. Nilai rata-rata Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Dari pengujian T-test, disimpulkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) pada unit usaha syariah selama masa pandemi Covid-19 tidak terdapat pengaruh yang signifikan di tahun 2017-2018 dan 2019-2020. Namun tingginya persentase BOPO di tahun 2019 dan 2020 menunjukkan perlu adanya penyesuaian yang lebih baik untuk menjaga sistem yang telah dibangun di dalam unit usaha syariah tersebut.
- e. Dari keempat rasio yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 20 unit usaha syariah selama masa pandemi Covid-19, terhitung dari tahun 2017-2018 dan 2019-2020. Sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan rasio-rasio lainnya agar hasil pengukuran lebih valid.
- b. Penambahan sampel unit usaha yang akan diteliti. Kedepannya juga dapat melibatkan Bank-bank daerah agar terlihat perbandingannya.



- c. Sebaiknya unit usaha syariah lainnya perlu ditingkatkan dalam melakukan evaluasi setiap tahun menggunakan berbagai rasio yang sudah ada agar dapat memilih kebijakan yang tepat untuk kedepannya.
- d. Setiap unit usaha syariah perlu memprediksi dan menganalisis berbagai kemungkinan fenomena-fenomena yang akan hadir kedepannya. Unit usaha yang mampu membaca kemungkinan dan mempersiapkan segala sistem yang nantinya dibangun cenderung dapat tetap *survive* dan bertahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman firdaus thaha(2020). *Analisis Perbedaan NPF,FDR, NPF,dan BOPO Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia :Studi Masa Pandemi Covid-19. At-Taqaddum*,9726, 13–24
- Afrianty,n.(2019). *analisis kinerja bank pembiayaan rakyat (BPRS) di provinsi Bengkulu dengan pendekatan sharia maqasid index(SMI)*.jurnal baabu al-lmi ekonomi dan perbankan syariah,4(2),208
- Albanjari,F.R,dan Kurniawan,C.(2020) *implementasi kebijakan peraturan otoritas jasa keuangan (poj) no.11/poj 03/2020 dalam menekan non performing financing (NPF) pada perbankan syariah*.jurnal eksyar (jurnal ekonomi syariah,07(01),24-36
- Dewi,kartika shintia dan prasetiono,p.2012. *analisis pengaruh ROA,NPMM,DER dan size terhadap praktik perataan laba (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010)*,journal of management ,I(4) 172-180
- Kasmir.2012. *pemasaran bank*.prenadamedia.jakarta 2(1), 149
- Kusnan,mokhammad ainur rofiq,and lukman hakim.2018. “peran ulama dalam sosialisasi pengembangan perbankan syariah”.*prosiding seminar nasional dan call for papers manajemen,akuntansi dan perbankan*.1252-1266.  
<http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/781>.

Muhith,abdul.2012. “sejarah perbankan syariah”,Attanwir : *jurnal kajian keislaman dan pendidikan*1(2)6984.<http://journal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/attanwir/article/view/3108>.

Naser,kamal,ahmad jamal,and khalifah al-khatib.1999. “Islamic banking :A study of satisfaction and preference in Jordan. “*international journal off bank marketing* 17 (3),135-150.<http://doi.org/10.1108/02652329910269275>.

Rosanti,R.A (2019) *telah kinerja keuangan perbankan syariah dengan pendekatan shariah maqashid index di Indonesia*.prosiding seminar nasional dan call for ...,10,85.<http://jurnal.unmuh-jember.ac.id/php/sncp/article/view/1996>.

Ruslim.2012.*analisis pengaruh capital adequacy ratio(CAR),non performing loan (NPL),dan loan to deposit ratio(LDR),terhadap return on assets (ROA) pada bank umum syariah yang terdaftar dibank Indonesia*.jurnal perbankan syariah,I(1).